



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK JOGJA *SMART PROVINCE*

TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan yang inovatif dengan didukung oleh teknologi informasi dan inovasi digital;
 - b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan alternatif penyelesaian permasalahan dan inovasi yang menyesuaikan dengan kekhasan karakteristik dan kearifan lokal;
 - c. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang sinergis, sistematis, dan terencana sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, perlu dilakukan pendekatan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui Rencana Induk Jogja *Smart Province*;
 - d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja *Cyber Province* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK JOGJA *SMART PROVINCE* TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028 adalah pendekatan kreatif dan inovatif Pemerintah Daerah dan kelompok pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan provinsi melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk tercapainya kehidupan masyarakat Yogyakarta yang sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.
2. Rencana Aksi Jogja *Smart Province* adalah program kerja yang bertujuan untuk menunjang terlaksana serta tercapainya sasaran dari pelaksanaan inovasi yang disertai Peta Jalan Pembangunan Jogja *Smart Province*.
3. *Quickwin* Jogja *Smart Province* adalah program unggulan pada masing-masing dimensi pembangunan *Smart Province* yang akan dilaksanakan dalam waktu pendek/cepat dan membawa dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

4. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) adalah upaya mewujudkan ekosistem sosial, ekonomi, dan teknis yang bersifat humanis demi terwujudnya masyarakat yang produktif dengan literasi digital dan adaptabilitas yang tinggi.
5. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan komponen utama pendukung aktivitas masyarakat.
6. Pencitraan Cerdas (*Smart Branding*) adalah upaya inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
7. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) adalah upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
8. Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar yang diwujudkan dalam bentuk layanan publik kepada masyarakat, birokrasi yang efektif dan efisien, serta perancangan kebijakan yang sesuai.
9. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah upaya inovatif dengan memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028 berlandaskan nilai:

- a. *sangkan paraning dumadi* yakni pendekatan terhadap nilai-nilai luhur ketuhanan berupa jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin, dan komitmen dalam menjalani kehidupan;
- b. *hamemayu hayuning bawana* yakni ajakan untuk hidup dalam keindahan, keselarasan, dan keharmonisan pada lingkup berbangsa dan bernegara; dan
- c. *manunggaling kawula lan gusti* yakni bersatunya pemimpin dengan rakyat dalam sebuah hubungan yang simetris dan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara keduanya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. sebagai panduan pelaksanaan dalam mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah DIY Tahun 2024-2028;
- b. memberikan pilihan solusi atas isu strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berbasis inovasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
- c. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan program dan kegiatan;
- d. menyelaraskan penerapan *smart city* kabupaten/kota di wilayah DIY; dan
- e. mewujudkan ruang partisipasi publik dalam pembangunan yang inklusif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028 meliputi:
 - a. Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
 - b. Pencitraan Cerdas (*Smart Branding*);
 - c. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*);
 - d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*);
 - e. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*); dan
 - f. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*).
- (2) Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bidang kerja pada sektor tata kelola pemerintahan.
- (3) Pencitraan Cerdas (*Smart Culture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bidang kerja pada sektor tata ruang, budaya dan pariwisata.
- (4) Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki bidang kerja pada sektor kewilayahan dan lingkungan.
- (5) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki bidang kerja pada sektor tata ruang, transportasi dan kesehatan.
- (6) Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki bidang kerja pada sektor pendidikan dan kemasyarakatan.
- (7) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki bidang kerja pada sektor industri dan ekonomi.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Arah Pembangunan Jogja *Smart Province*;
BAB III : Strategi Pembangunan Jogja *Smart Province*;
BAB IV : Rencana Aksi Jogja *Smart Province*;

BAB V : Kerangka Pendanaan; dan

BAB VI : Penutup.

- (2) Rencana Induk Jogja *Smart Province Tahun 2024-2028* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penjabaran strategi pembangunan jogja *smart province* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Aksi Jogja *Smart Province*; dan
- b. *Quickwin* Jogja *Smart Province*.

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Jogja *Smart Province* terdiri atas:
 - a. pengembangan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pengembangan infrastruktur pendukung;
 - c. pengembangan perangkat lunak; dan
 - d. penguatan literasi.
- (2) Rencana Aksi Jogja *Smart Province* berlaku selama periode Rencana Induk Jogja *Smart Province Tahun 2024-2028*.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan reuiu Rencana Aksi Jogja *Smart Province* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Aksi Jogja *Smart Province* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) *Quickwin* Jogja *Smart Province* terdiri atas:
 - a. *quickwin* yang akan dilaksanakan oleh internal Perangkat Daerah; dan
 - b. *quickwin* program kolaborasi dan kerjasama *smart province* lintas kabupaten/kota se-DIY.
- (2) *Quickwin* Jogja *Smart Province* disusun setiap tahun untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengusulkan *Quickwin Jogja Smart Province* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk *Jogja Smart Province 2024-2028* meliputi:
 - a. siklus besar; dan
 - b. siklus kecil.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 10

- (1) Siklus besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan evaluasi terhadap rencana aksi dan *Quickwin Jogja Smart Province* yang dilaksanakan setelah periode Rencana Induk *Jogja Smart Province* Tahun 2024-2028 berakhir.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk *Jogja Smart Province* pada periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Siklus kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemantauan dan evaluasi implementasi rencana aksi; dan
 - b. perumusan *Quickwin Jogja Smart Province* tahun selanjutnya.

- (2) Siklus kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama periode Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menelaah kinerja dan capaian dari implementasi rencana aksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam reuiu Rencana Aksi Jogja *Smart Province*.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint* Jogja *Cyber Province* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 46);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK *JOGJA SMART PROVINCE*
TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

Dokumen Rencana Induk *Jogja Smart Province* ini adalah sebuah dokumen perencanaan strategis yang menentukan masa depan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini menjelaskan bagaimana pembangunan di DIY dapat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip cerdas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengawali uraian tentang berbagai aspek dalam dokumen Rencana Induk *Jogja Smart Province*, bab pertama Pendahuluan menjelaskan tentang empat hal, yaitu: (1) latar belakang, (2) tujuan, (3) landasan hukum, serta (4) kerangka pikir. Subbab Latar Belakang berperan sebagai pengantar memperkenalkan DIY dan alasan Pemerintah Daerah DIY menyusun Rencana Induk *Jogja Smart Province*. Selanjutnya subbab kedua menguraikan tujuan dari dokumen Rencana Induk *Jogja Smart Province*. Setiap perencanaan di ranah publik perlu mempunyai dasar hukum yang jelas, dan penyusunan Rencana Induk *Jogja Smart Province* ini didasari oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijelaskan pada subbab ketiga. Yang terakhir, subbab keempat menjelaskan kerangka pikir yang digunakan dalam menyusun dokumen Rencana Induk *Jogja Smart Province* ini.

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah dengan luas 3.170.645 kilometer persegi. Di sisi selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dibatasi oleh Samudera Hindia, di sebelah timur laut dibatasi oleh Kabupaten Klaten, di sebelah tenggara dibatasi oleh Kabupaten Wonogiri, di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Purworejo, dan di sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Magelang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 pasal 8 ayat (1), Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Keistimewaan ini berakar dari sejarah pemerintahan nagari Kasultanan dan Kadipaten, dan telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara geografis, DIY terletak di tengah-tengah Pulau Jawa bagian selatan, dengan bentuk wilayah yang mirip dengan bangun segitiga dan dicirikan oleh Gunung Merapi sebagai puncaknya. Wilayah DIY secara keseluruhan cenderung subur dan memiliki potensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian. Setiap kabupaten/kota juga memiliki potensi alam yang berbeda. Keindahan dan keunikan alamnya juga berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wilayah ini (RPJMD DIY, 2022).

Dilihat dari penduduknya, Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yang terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 8,20% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 7,57% dimana Kota Yogyakarta menjadi kota paling favorit untuk ditinggali. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan 11.579 jiwa per km². Kemudian disusul oleh Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan yang paling rendah ada di Kabupaten Gunung Kidul hanya sebesar 510 jiwa per km² (RPJMD DIY, 2022).

Kondisi DIY yang khas, baik secara geografis, alam, maupun demografinya, membuatnya memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu keunggulan DIY adalah pada aspek sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY selalu berada di atas rerata nasional dan dikategorikan 'sangat tinggi' menurut kriteria UNDP. DIY, utamanya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, adalah daerah tujuan bagi banyak siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Ada 128 perguruan tinggi yang tersebar di Provinsi DIY, beberapa di antaranya merupakan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam bidang kebudayaan, DIY juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan daya tarik internasional. DIY juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Lokasinya yang dekat dengan obyek-obyek wisata yang mendunia sangat mendukung tumbuhnya industri pariwisata.

Di sisi lain, DIY juga menghadapi beberapa permasalahan yang serius. Menurut Bappeda DIY (2023) setidaknya ada 4 permasalahan pokok yang dihadapi: kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana. Bila tidak ditangani secara serius, tiga permasalahan pertama dapat mengakibatkan dampak-dampak sosial yang besar. Persoalan keempat menjadikan DIY rentan karena bencana, tanpa daya tahan yang kuat, sendi-sendi kehidupan masyarakat akan mudah berantakan akibat terjangan bencana dalam skala besar.

Kondisi DIY dalam berbagai aspeknya menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2022-2027 memuat visi, tujuan, dan sasaran pembangunan untuk merespon kondisi yang dihadapi saat ini. RPJMD ini merupakan kelanjutan dari RPJMD-RPJMD periode sebelumnya yang mencoba mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 yaitu “Mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera” dengan meletakkan fokus pembangunan pada wilayah selatan DIY.

Kesinambungan tema sentral pembangunan DIY sejak pertengahan tahun 2000an ini didukung oleh pendekatan yang bersifat kontemporer: pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek pembangunan. Tonggak pertama dari pendekatan kontemporer ini adalah dicanangkannya konsep *Jogja Cyber Province* (JCP) pada tahun 2006. JCP adalah inisiatif *quad helix* yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam memanfaatkan TIK dalam bidangnya masing-masing, yang bila dikembangkan secara konsisten akan konvergen dan membentuk provinsi DIY yang kehidupannya diwarnai oleh pemanfaatan teknologi yang harmonis.

Dalam mendukung perwujudan JCP, Pemerintah DIY mencanangkan program *Digital Government Services* (DGS) yang bertujuan melakukan transformasi birokrasi di lingkup Pemerintah DIY untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Premis DGS yang menekankan pada kata “*services*” adalah: layanan publik yang diselenggarakan lembaga-lembaga pemerintahan akan meningkat mutunya bila pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal struktur organisasi, pengelolaan keuangan dan SDM, regulasi, dan nilai serta budaya kerja, yang diselaraskan dengan TIK sebagai *enabler*. Dengan demikian DGS adalah sebuah inisiatif yang berpusat pada sisi pemerintahan, namun diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perjalanannya, DGS mengalami banyak kendala yang terkait dengan regulasi, manajemen, biaya akses dan koneksi Internet, SDM, dan budaya kerja, sehingga implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, keinginan untuk mewujudkan DIY sebagai provinsi siber (*Jogja Cyber Province*) tidaklah surut. Pada tahun 2018, Pemerintah DIY memperbarui konsep *Jogja Cyber Province* menjadi *Jogja Smart Province* (JSP) untuk mendukung pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022 yang mengangkat visi Gubernur DIY 2017-2022 “Menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja”. JSP didefinisikan sebagai “Pendekatan kreatif dan inovatif dari Pemerintah DIY dan setiap kelompok pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis

dan/atau pengembangan sektor unggulan DIY melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman”. Untuk mengawal implementasi JSP, disusunlah dokumen Rencana Induk Jogja *Smart Province* pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, Pemerintah DIY melakukan implementasi Rencana Induk JSP secara terbatas pada area Sumbu Filosofis. Sumbu Filosofis adalah area yang membentuk garis lurus imajiner, dibatasi oleh Panggung Krapyak di sebelah selatan dan Tugu Golong Gilig di sebelah utara. Di area ini dilakukan implementasi beberapa program indikatif yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk JSP. Implementasi ini dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya pada skala yang lebih luas.

Konsep Jogja *Smart Province* mendapatkan dorongan yang lebih besar pada periode pemerintahan tahun 2022-2027. Visi Gubernur DIY tahun 2022-2027 adalah “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Kata-kata “pemanfaatan teknologi informasi” secara eksplisit muncul dalam pernyataan visi Gubernur, memberikan penekanan yang jelas terhadap arah pengembangan DIY sebagai provinsi yang cerdas dalam menjalankan pembangunan daerahnya.

Semangat yang tinggi untuk memanfaatkan TIK dalam pembangunan daerah ini menemukan momentumnya ketika berpadu dengan inisiatif Gerakan *Smart City* Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Gerakan yang dimulai tahun 2017 ini bertujuan membantu pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membangun daerahnya menjadi kota-kota cerdas (*smart cities*) dengan cara mendampingi mereka dalam menyusun dokumen Rencana Induk *smart city*. Sampai dengan tahun 2022, sudah 191 daerah yang didampingi, termasuk semua kabupaten/kota di wilayah DIY. Pada tahun 2023, Gerakan *Smart City* Indonesia melangkah ke level provinsi, dan salah satu dari dua provinsi yang mendapatkan kehormatan untuk didampingi dalam penyusunan dokumen Rencana Induk *Smart Province* adalah DIY. Dalam konsep *Smart Province*, fokusnya bukan hanya perencanaan program dan kegiatan inovatif pada level provinsi saja, namun juga konsolidasi dan kolaborasi antar kabupaten/kota dalam satu kesatuan kawasan dalam menghadapi isu/problem bersama.

Penyusunan dokumen Rencana induk Jogja *Smart Province* tahun 2023 ini (disebut juga Rencana induk Jogja *Smart Province* versi 2) adalah satu langkah penting untuk mempertahankan keberlanjutan konsep *smart province* yang sudah dijalankan DIY sejak tahun 2006. Dokumen Rencana induk Jogja *Smart Province* versi 2 bukan hanya sekedar mendukung program dan kegiatan pembangunan

yang dijabarkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, namun juga menjamin kontinuitas arah dan strategi pembangunan dari masa-masa sebelumnya. Kesempatan untuk mempertahankan kontinuitas secara mulus (*seamless*) ini adalah modal besar bagi perencanaan pembangunan di DIY. Rencana Induk Jogja *Smart Province* versi 2 harus dapat menangkap momentum penting ini dan menggariskan perencanaan pembangunan yang inovatif dengan didukung oleh TIK guna mewujudkan DIY sebagai provinsi cerdas.

1.2 Tujuan

Untuk mendukung terwujudnya DIY sebagai provinsi cerdas, RPJMD DIY sebagai dokumen induk perencanaan lima tahunan perlu “didampingi” oleh dokumen perencanaan tambahan yang secara spesifik berfokus pada strategi pencapaian tujuan yang lebih efektif, efisien, produktif, dan berdampak. Rencana Induk Jogja *Smart Province* versi 2 ini menjalankan peran tersebut. Secara lebih spesifik, tujuan Rencana Induk Jogja *Smart Province* versi 2 adalah sebagai berikut.

1. Menjamin kontinuitas inisiatif “provinsi cerdas” yang telah dijalankan sejak tahun 2006;
2. Menjadi acuan/referensi bagi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah DIY yang diwarnai dengan inovasi;
3. Menjadi acuan/referensi bagi sinergi dan kolaborasi antar program dan kegiatan pembangunan inovatif, baik pada dimensi horizontal (antar OPD di lingkungan Pemerintah DIY) maupun vertikal (melibatkan kabupaten/kota di wilayah DIY); dan
4. Menjadi *platform* bagi pengembangan dan integrasi inisiatif-inisiatif cerdas berikutnya yang berorientasi pada pengembangan inovasi dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat dan penguatan serta promosi potensi/kekhasan daerah yang bermuara pada peningkatan daya saing masyarakat dan provinsi DIY.

1.3 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang mengatur peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pembangunan *Smart Province* yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
18. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2021;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
30. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
34. Surat Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Pembangunan DIY;
35. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 299/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jogja *Smart Province*;
36. Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 189 Tahun 2021 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Bantul;
37. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan *Smart City* Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026;

38. Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Gunung Kidul;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026; dan
40. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-66/DJAI/HK.04.02/2023 dan Nomor: 557/2584 tentang Implementasi Gerakan Menuju Provinsi Cerdas (*Smart Province*) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

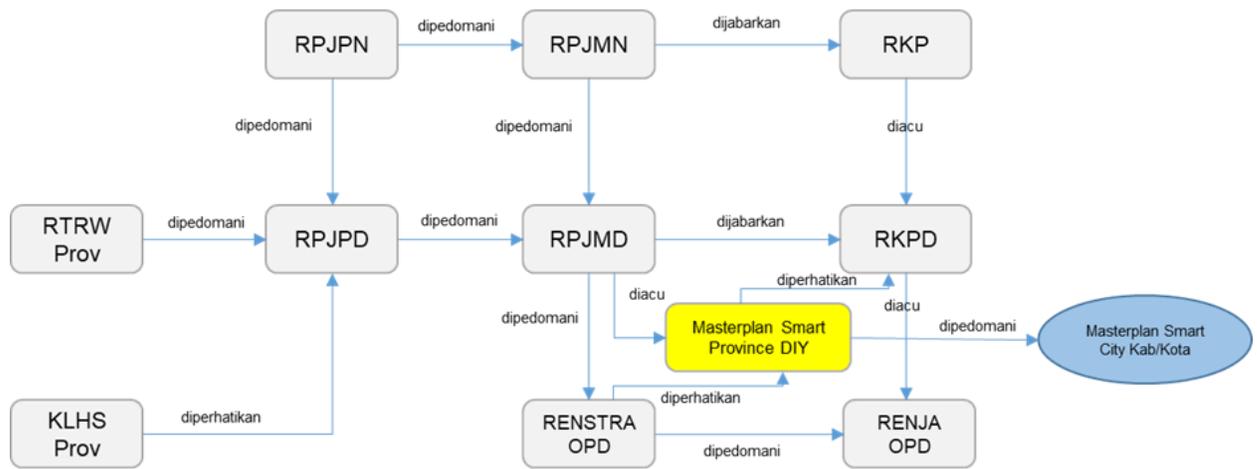
1.4 Kerangka Pikir

Penyusunan dokumen Rencana Induk Jogja *Smart Province* bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri. Ia berada dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan yang utuh dan berkelanjutan. Untuk itu penyusunan dokumen Rencana Induk Jogja *Smart Province* perlu mengikuti beberapa prinsip penting dan dijalankan dalam suatu kerangka yang selaras dengan proses perencanaan pembangunan yang berlaku.

Prinsip **pertama**, Rencana Induk *Smart Province* ini merupakan satu dokumen utuh yang merujuk pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) tiap OPD dan juga merujuk pada Rencana Induk *Smart City* yang ada di Kabupaten/ Kota. Prinsip **kedua**, konten Rencana Induk *Smart Province* berbeda dengan konten Rencana Induk *Smart City* untuk lingkup kota atau kabupaten, karena kota atau kabupaten hanya satu daerah otonom, sedangkan provinsi mencakup banyak daerah otonom. Implikasi dari cakupan banyak daerah otonom adalah konten Rencana Induk *Smart Province* bertambah dengan program-program kolaborasi antar kabupaten/kota, bukan hanya program-program untuk lingkup pemerintah provinsi saja. Dalam dokumen Rencana Induk Jogja *Smart Province* versi 1.0 (2018) memang telah terungkap keinginan untuk merumuskan penyelesaian isu-isu bersama yang dihadapi oleh kabupaten/kota, tapi belum dilakukan upaya untuk membicarakan inovasi-inovasi kolaboratif untuk membangun solusi tersebut, sehingga konten Rencana Induk Jogja *Smart Province* versi 1.0 (2018) masih didominasi oleh program-program internal Pemerintah Provinsi.

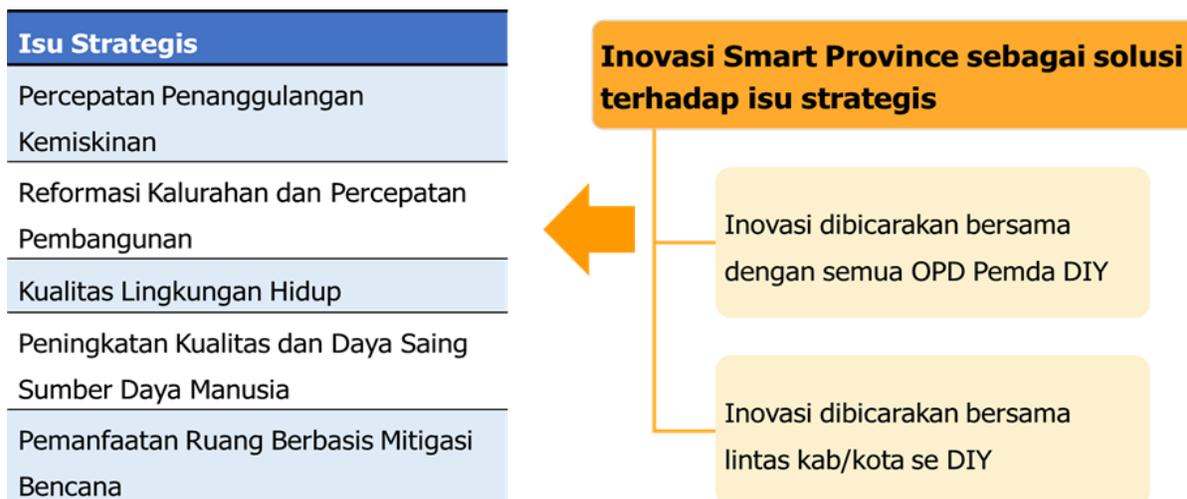
Prinsip **ketiga**, berdasar pemikiran adanya dua ruang lingkup internal pemerintah provinsi dan eksternal pemerintah provinsi, dapat dirancang hubungan antara analisis-analisis yang dilakukan dan rincian rencana Rencana Induk Jogja *Smart Provinsi* seperti terlihat pada Gambar 1.1. Skema pada Gambar

1.1 menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Jogja *smart province* sangat memperhatikan keselarasan antara pembangunan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Inisiatif *smart city* di tingkat kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *smart province* DIY.



Gambar 1.1 Hubungan antara Analisis-Analysis yang Dilakukan dan Rincian Rencana Rencana Induk *Smart Province*

Prinsip **keempat**, perumusan inovasi program *Smart Province*, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, dilakukan dengan dengan cara *rembugan* (mencari kesepakatan). Untuk lingkup internal pemerintah provinsi, *rembugan* dilakukan antar-OPD (organisasi perangkat daerah), sedangkan untuk lingkup eksternal, *rembugan* dilakukan antara kabupaten/kota bersama pemerintah provinsi. Inovasi program *Smart Province* ditujukan untuk memberi solusi yang cerdas terhadap isu-isu strategis (yang diprioritaskan), seperti diilustrasikan pada Gambar 1.2. Isu-isu strategis tersebut diambil dari dokumen RPJMD DIY 2022-2027. Pemilihan isu strategis ini merupakan hasil perumusan permasalahan pokok prioritas di DIY yang perlu segera diselesaikan, antara lain masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah dan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana.



Gambar 1. 2 Inovasi Program *Smart Province* Ditujukan untuk Memberi Solusi yang Cerdas terhadap Isu-Isu Strategis dalam RPJMD (yang diprioritaskan)

Prinsip **kelima**, dalam lingkup eksternal pemerintah provinsi, hasil rembuan antar kabupaten/kota bersama pemerintah provinsi menghasilkan inovasi-inovasi program *Smart Province* yang akan dijalankan secara kolaborasi (minimal antar dua kabupaten/kota). Program-program yang dikolaborasikan ini dapat dikategorikan sebagai “kolaborasi formal, sengaja” dalam arti kolaborasi didasarkan pada keputusan formal dan disengaja berkolaborasi antara pihak. Dalam dokumen Rencana Induk *Smart Province* juga diidentifikasi dan dipetakan kategori yang berbeda yang dapat disebut sebagai “kolaborasi organik, tidak sengaja”. Kolaborasi dalam kategori ini bukan hasil kesepakatan antar kabupaten/kota tapi dikerjakan sendiri-sendiri tapi mampu untuk melayani atau memenuhi kebutuhan bukan hanya penduduk daerahnya sendiri tapi dimanfaatkan juga oleh penduduk daerah lain, sehingga pada akhirnya juga akan membawa dampak yang lebih besar dan/atau meluas (membawa *multiplier impact*). Dalam hal ini, tidak harus setiap daerah memenuhi sendiri-sendiri kebutuhan tersebut tapi salah satu saja dan daerah-daerah yang lain ikut memanfaatkan. Misal: Kabupaten Gunungkidul mengembangkan inovasi program “*smart tourism* untuk wisata pantai”, maka inovasi tersebut dapat juga dimanfaatkan atau memenuhi kebutuhan penduduk seluruh provinsi, bukan hanya penduduk kabupaten sendiri. Program-program kolaborasi ini secara spesifik dijelaskan pada Bab IV.

Untuk menyelaraskan pembangunan *smart province* di DIY dengan standar universal yang ada, maka sasaran-sasaran Rencana Induk Jogja *Smart Province* perlu disinkronkan dengan indikator-indikator kota cerdas yang telah terstandarisasi, yaitu Indikator SNI ISO 37122:2019. Indikator SNI ISO Kota Cerdas sendiri berjumlah 80 indikator yang terbagi kedalam 6 dimensi dan 18 sub-dimensi *Smart Province*. Yang perlu dicatat adalah saat ini belum semua Indikator SNI ISO 37122:2019 sesuai (*applicable*) untuk kondisi di Indonesia. Penyelarasan ini lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mulai mengaitkan dan mengarahkan pembangunan *smart province* ke arah yang disepakati secara global. Pemetaan sasaran dan indikator *Smart Province* ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Matriks keterhubungan indikator *Smart Province*, RPJMD, dan SNI 37122:2019

No	Dimensi <i>Smart Province</i>	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama <i>Smart Province</i> RPJMD (2022 - 2027)	Target Tahun 2024
1	<i>Smart Governance</i>	Layanan Publik (<i>Public</i>)	Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.12

No	Dimensi <i>Smart Province</i>	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama <i>Smart Province</i> RPJMD (2022 - 2027)	Target Tahun 2024
		<i>Service</i>)	publik yang efektif dan terintegrasi	(SPBE)	
				2. Indeks Kepuasan Masyarakat	87.76
		Birokrasi (<i>Bureaucracy</i>)	1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A
			2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	2. Opini BPK	WTP
		Perancangan Kebijakan (<i>Policy Design</i>)	Kebijakan publik yang efektif	Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP)	AA
2	<i>Smart Branding</i>	Pariwisata (<i>Tourist</i>)	Menjadikan DIY sebagai destinasi wisata dan budaya No. 1 di Indonesia	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2.48 hari
		Daya Saing Bisnis (<i>Business Competitiveness</i>)	Menjadikan DIY sebagai pusat industri kreatif berskala internasional	Meningkatkan nilai realisasi Investasi di DIY	Rp 3,02 Triliun
		Wajah Kota (<i>Face of The City</i>)	Menciptakan keharmonisan tata ruang dan wajah kota sesuai dengan karakter budaya dan aktivitas masyarakat di seluruh lini	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,78

No	Dimensi <i>Smart Province</i>	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama <i>Smart Province</i> RPJMD (2022 - 2027)	Target Tahun 2024		
3	<i>Smart Economy</i>	Ekosistem Industri <i>(Industry)</i>	Menciptakan ekosistem sektor ekonomi unggulan daerah yang berkelanjutan	1. IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,42		
				2. Persentase Desa Mandiri	62,24		
				3. Rasio Kewirausahaan (%)	3,7		
		Kesejahteraan Masyarakat <i>(Welfare)</i>	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berdaya saing global	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,1-5,6		
				2. Pendapatan Perkapita (Rp juta)	30,23		
				3. Angka Kemiskinan	10,16		
				4. TPT	3,45-3,8		
		Ekosistem Transaksi Keuangan <i>(Transaction)</i>	Mewujudkan ekosistem transaksi keuangan yang efisien dan memberikan sebesar-besarnya nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat DIY	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%		
		4	<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang <i>(Harmony)</i>	1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi 2. Meningkatkan pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang	1. Persentase penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	67,03
						2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,62
3. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	113,11						

No	Dimensi <i>Smart Province</i>	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama <i>Smart Province</i> RPJMD (2022 - 2027)	Target Tahun 2024
		Kesehatan <i>(Health)</i>	Terwujudnya sinergitas dan kolaborasi dalam sistem informasi kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	75,18
				2. Prevalensi stunting	14,0
				3. Persentase penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	98,203%
		Transportasi <i>(Mobility)</i>	Meningkatnya kualitas transportasi publik	Persentase capaian mobilitas berkelanjutan di wilayah DIY	48,34%
5	<i>Smart Society</i>	Interaksi Masyarakat <i>(Community)</i>	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai kebudayaan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,36
				2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,37
		Ekosistem Belajar/ Pendidikan <i>(Learning)</i>	Meningkatkan SDM yang berkarakter dan berkualitas	1. Harapan Lama Sekolah	15,74
				2. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	76,39
Keamanan Masyarakat <i>(Security)</i>	Mewujudkan sistem keamanan masyarakat yang integratif dan partisipatif	<i>Crime rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	124,7		
6	<i>Smart Environment</i>	Proteksi Lingkungan <i>(Environmental Protection)</i>	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang
				2. Penurunan emisi GRK (ribu CO ₂ eq)	2,639

No	Dimensi <i>Smart Province</i>	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama <i>Smart Province</i> RPJMD (2022 - 2027)	Target Tahun 2024
		Pengelolaan Sampah dan Limbah <i>(Waste Management)</i>	Optimalisasi berbagai inovasi pengolahan sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang
		Tata Kelola Energi <i>(Energy)</i>	Pengelolaan energi terbarukan	Jumlah pemanfaatan energi baru terbarukan	56.030 TOE

Sumber: Hasil analisis, 2023

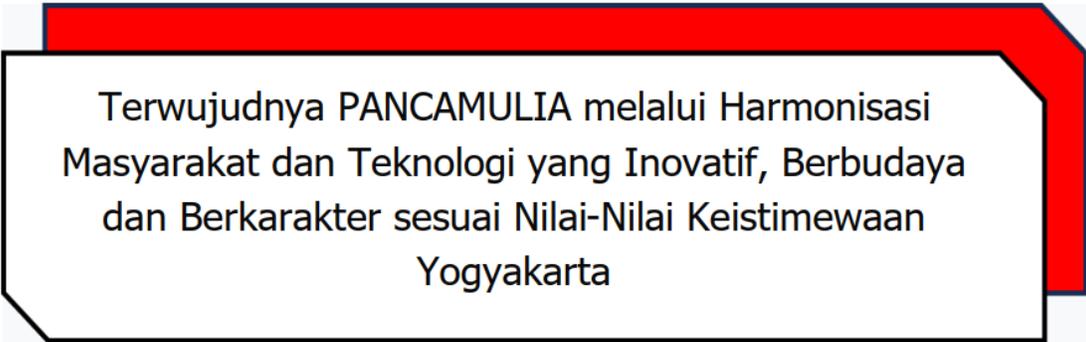
BAB II

ARAH PEMBANGUNAN JOGJA *SMART PROVINCE*

Bab II menjabarkan tentang visi, misi dan sasaran pembangunan Jogja *Smart Province*. Visi dan misi Jogja *Smart Province* diturunkan dari visi dan misi pembangunan daerah yang penjelasannya disampaikan dalam Subbab 2.1. Selanjutnya dari rumusan visi dan misi Jogja *Smart Province* diturunkan sasaran-sasaran pembangunan Jogja *Smart Province* yang disesuaikan dengan kondisi wilayah DIY yang tergambar dari analisis kesenjangan dan analisis SWOT, penjelasannya untuk masing-masing dimensi disampaikan dalam Subbab 2.2.

2.1 Visi dan Misi *Smart Province*

Visi dan misi Jogja *Smart Province* dianalisis berdasarkan dari visi dan misi pembangunan daerah Provinsi DIY Tahun 2022 - 2027 serta berdasarkan visi misi Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* yang disusun pada tahun 2018. Lebih jauh, visi dan misi *Smart Province* disusun berdasarkan hasil analisis berbagai isu strategis permasalahan dan potensi yang ada di DIY. Visi Gubernur DIY Tahun 2022 - 2027 menekankan pada upaya Pemda DIY dalam mewujudkan PANCAMULIA MANUSIA JOGJA, dengan meletakkan Kawasan Selatan sebagai subyek prioritas pembangunan, melalui berbagai program yaitu: reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan hal tersebut, visi Jogja *Smart Province* dirumuskan sebagai berikut:



Terwujudnya PANCAMULIA melalui Harmonisasi Masyarakat dan Teknologi yang Inovatif, Berbudaya dan Berkarakter sesuai Nilai-Nilai Keistimewaan Yogyakarta

Secara eksplisit terdapat empat kata kunci utama yang terkandung dalam visi Jogja *Smart Province*, antara lain yaitu:

1. **PANCAMULIA:** DIY diarahkan untuk dapat mencapai lima tujuan mulia (Pancamulia), yaitu: peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, peningkatan kualitas & keragaman perekonomian masyarakat, terwujudnya harmoni kehidupan bersama, terwujudnya tata perilaku penyelenggara pemerintahan yang demokratis, dan terwujudnya perilaku bermartabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. **Harmonisasi Masyarakat:** DIY diarahkan untuk dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan sehingga terciptanya sinergitas dan kolaborasi *stakeholder*.
3. **Teknologi Inovatif:** DIY diarahkan untuk dapat mengoptimalkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagai *tools* dalam mempercepat transformasi spasial dan kelembagaan.
4. **Berbudaya dan Berkarakter:** DIY diarahkan untuk dapat tetap mempertahankan nilai-nilai keistimewaan (*sangkan paraning dumadi; Hamemayu hayuning bawana; Manunggaling kawula lan gusti*) sebagai Panglima dalam setiap dimensi *Smart Province*.

Visi pembangunan Jogja *Smart Province* selanjutnya diturunkan kedalam lima misi. Adapun misi Jogja *Smart Province* yaitu:

Misi 1	Mengoptimalkan layanan digital dalam kerangka PANCAMULIA
Misi 2	Menguatkan dan memasarkan <i>city branding</i> DIY
Misi 3	Meningkatkan keterampilan SDM dan kualitas hidup masyarakat Jogja yang inklusif, berbudaya, dan berdaya saing
Misi 4	Mendorong penguatan dan pemerataan ekonomi yang berbasis karakteristik sumberdaya ekonomi lokal
Misi 5	Menciptakan keharmonisan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan <i>sustainable</i>

Sedangkan arah kebijakan pembangunan *Smart Province* merupakan serangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai dalam implementasi *Smart Province*. Arah kebijakan pembangunan *Smart Province* terdiri dari visi dan misi *Smart Province* serta sasaran pembangunan *Smart Province*. Prinsip penting yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan Jogja *Smart Province* adalah terjaminnya keselarasan antara perencanaan *Smart Province* dengan perencanaan pembangunan DIY yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

2.2 Sasaran Pembangunan *Smart Province*

Sasaran pembangunan *Smart Province* adalah serangkaian tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam upaya menciptakan provinsi yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta konsep-konsep *Smart Province*. Sasaran pembangunan *Jogja Smart Province* merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dalam mencapai visi dan misi *Jogja Smart Province*. Sasaran-sasaran ini dijabarkan untuk tiap sub-dimensi *Smart Province*, seperti terlihat pada Tabel 2.1. Dalam penjabarannya, disampaikan pula dasar-dasar pemilihan sasaran, yang pada umumnya berupa kondisi-kondisi tidak ideal yang perlu diselesaikan melalui pembangunan *Smart Province*.

Tabel 2. 1 Perumusan sasaran pembangunan *Smart Province* pada tiap sub-dimensi

DIMENSI	SUB- DIMENSI	TUJUAN/SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
<i>Smart Governance</i>	Layanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi	Terbatasnya <i>sharing data</i> antar OPD dan daerah, kurangnya komunikasi internal antar lembaga, serta data yang tidak memadai.
	Birokrasi	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Perlunya peningkatan kinerja pemda melalui implementasi <i>Smart Governance</i>
	Perancangan Kebijakan	Kebijakan publik yang efektif	Adanya payung hukum yang mendukung penerapan <i>Smart Governance</i> namun belum terimplementasikan dengan baik
<i>Smart Branding</i>	Wajah Kota (<i>City's Appearance</i>)	Menciptakan keharmonisan tata ruang dan wajah kota sesuai dengan karakter budaya dan aktivitas masyarakat di seluruh lini	Penetapan Sumbu Filosofis sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO serta permasalahan alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang ruang
	Daya Saing Bisnis & Promosi Budaya	Menjadikan DIY sebagai tujuan investasi dan pengembangan industri kreatif berskala internasional	Adanya potensi industri kreatif di DIY yang belum dioptimalkan khususnya dari segi <i>branding</i> dan promosi

DIMENSI	SUB- DIMENSI	TUJUAN/SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		Menyediakan sistem promosi budaya yang terpadu dan mendunia	Setiap sektor sudah memiliki agenda promosi budaya, namun belum berjalan secara terpadu
	Pariwisata (<i>Tourism</i>)	Menjadikan DIY sebagai destinasi wisata, budaya dan pendidikan berstandar internasional	Sesuai arah pembangunan DIY untuk mengokohkan DIY sebagai destinasi pariwisata, budaya, dan pendidikan terbaik di Indonesia dan berkelas dunia.
<i>Smart Economy</i>	Ekosistem Industri	Menciptakan ekosistem sektor ekonomi unggulan daerah yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya potensi <i>health and wellness tourism</i> di DIY Pemasaran produk lokal baik dalam maupun luar negeri yang belum terintegrasi
	Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berdaya saing global	Kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam memasok produk UMKM dan peningkatan daya saing yang belum optimal
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Mewujudkan ekosistem transaksi keuangan yang efisien dan memberikan sebesar-besarnya nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat DIY	<ol style="list-style-type: none"> Literasi digital masyarakat belum optimal Terbatasnya sistem pembayaran digital yang terintegrasi di DIY
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi Meningkatkan pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang 	<ol style="list-style-type: none"> Permasalahan Penataan Tata Ruang dimana substansi data spasial terkait <i>sultan ground</i> yang tidak sama, serta pemanfaatan lahan yang tidak sesuai aturan tata ruang Sistem Informasi Perumahan dan aplikasi penanganan RTLH masih terbatas internal Pemda, belum terintegrasi antar Pemda, Pemkab / Kota, dan Pusat

DIMENSI	SUB- DIMENSI	TUJUAN/SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
			3. Perebutan lahan untuk lahan pertanian
	Kesehatan	Terwujudnya sinergitas dan kolaborasi dalam sistem informasi kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya aplikasi kesehatan yang belum terintegrasi 2. Belum terdapatnya layanan <i>hotline</i> kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya kualitas transportasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi umum belum memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna 2. Banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan kecenderungan masyarakat perkotaan dalam pemanfaatan moda transportasi umum 3. Akses untuk transportasi logistik masih kurang
<i>Smart Society</i>	Interaksi Masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang kuat, tangguh dan berbudaya baik dari sisi sosial, ekonomi maupun SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersamaan 2. Menurunnya pengamalan nilai-nilai kebudayaan 3. Tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan pengangguran
	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Terwujudnya sinergitas dan kolaborasi dalam pembelajaran dan pemahaman literasi	Belum optimalnya kolaborasi antar universitas, pemerintah dan masyarakat terkait literasi digital.

DIMENSI	SUB- DIMENSI	TUJUAN/SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		berbasis teknologi	
	Keamanan Masyarakat	Mewujudkan sistem keamanan masyarakat yang integratif dan partisipatif serta tanggap bencana	Belum meratanya media perlindungan kekerasan, keamanan dan tanggap bencana.
<i>Smart Environment</i>	Proteksi Lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kurangnya ketertiban dan pengawasan lingkungan hidup
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Optimalisasi berbagai inovasi pengolahan sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	Kurangnya kesadaran, kepedulian, dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah
	Tata Kelola Energi	Pengelolaan energi terbarukan	Belum adanya upaya dalam pengelolaan energi terbarukan

Sumber: Hasil analisis, 2023

Secara lebih detail, *Jogja Smart Province* menjadi sebuah inisiatif kolaborasi kewilayahan yang inovatif untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi DIY dengan tujuan untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Penyusunan Rencana Induk *Jogja Smart Province* dianalisis berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DIY Tahun 2022-2027, Rencana Strategis OPD Tahun 2023, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Merujuk pada isu strategis RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta konsep reformasi birokrasi tematik, terdapat 5 (lima) isu strategis yang diangkat dalam penyusunan Rencana Induk *Jogja Smart Province*. Adapun kelima isu strategis tersebut sebagai berikut.

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan;
3. Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
5. Pemanfaatan Ruang berbasis Mitigasi Bencana.

Pembangunan *smart province* diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh DIY. Dengan demikian, perlu adanya pemetaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

antara persoalan-persoalan besar yang dihadapi DIY (direpresentasikan dalam wujud isu-isu strategis yang termuat di RPJMD DIY 2022-2027) dengan visi, misi, dan tujuan/sasaran *Jogja Smart Province*. Adapun keterhubungan antara visi, misi, sasaran, dan isu strategis pembangunan *Jogja Smart Province* tertuang dalam Tabel 2.2. Secara keseluruhan, nampak bahwa berbagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dapat dicakup oleh seluruh dimensi *smart province*. Tabel 2.2 juga menunjukkan pendekatan holistik yang ditempuh: sebuah isu strategis ditangani oleh lebih dari satu dimensi *smart province*. Pendekatan holistik ini penting untuk diterapkan karena isu-isu strategis yang dihadapi DIY semuanya bersifat multisektoral dan tidak bisa diselesaikan melalui upaya sektoral saja.

**Tabel 2. 2 Keterhubungan Visi, Misi, Sasaran, dan Isu Strategis
Pembangunan *Jogja Smart Province***

No	Isu Strategis	Misi	Dimensi <i>Smart Province</i>	Tujuan/Sasaran
1	<p>Isu 1: Percepatan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Isu 2: Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan</p> <p>Isu 4: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p>	Mengoptimalkan layanan digital dalam kerangka PANCAMULIA	<i>Smart Governance</i>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan kebijakan publik yang efektif

No	Isu Strategis	Misi	Dimensi <i>Smart Province</i>	Tujuan/Sasaran
2	<p>Isu 1: Percepatan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Isu 4: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p>	<p>Menguatkan dan memasarkan <i>city branding</i> Provinsi DIY</p>	<p><i>Smart Branding</i></p>	<p>Menciptakan keharmonisan tata ruang dan wajah kota sesuai dengan karakter budaya dan aktivitas masyarakat di seluruh lini, menjadikan DIY sebagai tujuan investasi dan pengembangan industri kreatif berskala internasional, menyediakan sistem promosi budaya yang terpadu dan mendunia, dan menjadikan DIY sebagai destinasi wisata, budaya dan pendidikan berstandar internasional.</p>
3	<p>Isu 1: Percepatan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Isu 2: Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan</p> <p>Isu 4: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p> <p>Isu 5: Pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Meningkatkan keterampilan SDM dan kualitas hidup masyarakat Jogja yang inklusif, berbudaya, dan berdaya saing</p>	<p><i>Smart Society</i></p>	<p>Mewujudkan masyarakat yang kuat, tangguh dan berbudaya baik dari sisi sosial, ekonomi maupun SDM, terwujudnya sinergitas dan kolaborasi dalam pembelajaran dan pemahaman literasi berbasis teknologi, dan mewujudkan sistem keamanan masyarakat yang integratif dan partisipatif serta tanggap bencana.</p>

No	Isu Strategis	Misi	Dimensi <i>Smart Province</i>	Tujuan/Sasaran
4	<p>Isu 1: Percepatan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Isu 4: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p>	<p>Mendorong penguatan dan pemerataan ekonomi yang berbasis karakteristik sumberdaya ekonomi lokal</p>	<p><i>Smart Economy</i></p>	<p>Menciptakan ekosistem sektor ekonomi unggulan daerah yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berdaya saing global, dan mewujudkan ekosistem transaksi keuangan yang efisien dan memberikan sebesar-besarnya nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat DIY</p>
5	<p>Isu 1: Percepatan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Isu 2: Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan</p> <p>Isu 3: Kualitas lingkungan hidup</p> <p>Isu 4: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p> <p>Isu 5: Pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Menciptakan keharmonisan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan <i>sustainable</i></p>	<p><i>Smart Living</i></p>	<p>Terwujudnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi, meningkatkan pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang, terwujudnya sinergitas dan kolaborasi dalam sistem informasi kesehatan, dan meningkatnya kualitas transportasi publik</p>

No	Isu Strategis	Misi	Dimensi <i>Smart Province</i>	Tujuan/Sasaran
	Isu 3: Kualitas lingkungan hidup		<i>Smart Environment</i>	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi berbagai inovasi pengolahan sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, dan Pengelolaan energi terbarukan

Sumber: Hasil analisis, 2023

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN JOGJA *SMART PROVINCE*

Strategi adalah perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran tertentu. Strategi pembangunan *Smart Province* berarti perencanaan yang dibuat untuk memaksimalkan peluang keberhasilan pembangunan *Smart Province*, khususnya di DIY. Penyusunan strategi pembangunan *Smart Province* dilandasi oleh visi, misi, dan sasaran *Smart Province*. Visi-misi-sasaran *Smart Province* mendefinisikan arah, tujuan, dan batasan-batasan bagi perencanaan yang dibuat. Selain visi-misi-sasaran, penyusunan strategi Jogja *Smart Province* juga perlu memperhatikan kondisi DIY saat ini. Kesiapan DIY (dalam berbagai aspek) dan kesenjangan yang terjadi antara kondisi *baseline* dengan kondisi yang dicita-citakan akan mendefinisikan ruang lingkup strategi yang akan diusulkan.

Secara umum, berbagai analisis yang dijelaskan dalam Buku I: Analisis Strategis Jogja *Smart Province* digunakan sebagai dasar bagi penyusunan strategi *Smart Province* yang dijelaskan pada bab ini. Uraianya disampaikan menurut dimensi *Smart Province*, sehingga tiap dimensi *Smart Province* memiliki strategi yang khas untuk dimensi tersebut.

3.1. *Smart Governance*

Secara umum, dimensi *Smart Governance* dapat didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar yang diwujudkan dalam bentuk layanan publik kepada masyarakat, birokrasi yang efektif dan efisien, serta perancangan kebijakan yang sesuai. Oleh karena itu, *Smart Governance* terdiri dari tiga sub dimensi yaitu layanan publik (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan perancangan kebijakan (*policy*). Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong terwujudnya *Smart Governance* DIY, yakni:

Tabel 3. 1 Strategi Dimensi *Smart Governance*

Sub Dimensi	Strategi
Layanan publik (<i>public service</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Pendefinisian standar data dan metadata pokok yang berlaku untuk Pemerintah Kab/Kota se-DIY.• Pemanfaatan <i>platform</i> portal layanan publik berbasis <i>Single Sign On</i> (SSO).• Sosialisasi program <i>smart governance</i> yang berkelanjutan.• Optimalisasi atas digitalisasi layanan yang ada dengan melakukan simplifikasi alur proses bisnis layanan publik.
Birokrasi (<i>bureaucracy</i>)	<ul style="list-style-type: none">• SDM Digital• Penguatan pemahaman transformasi digital• Penguatan Budaya Kerja• Efisiensi birokrasi layanan publik• Review kelembagaan DIY
Kebijakan (<i>policy</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang <i>Smart Province</i>, tentang SPBE, dan tentang Satu Data kepada seluruh <i>stakeholder</i> dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kolaborasi dan integrasi antar <i>platform</i> layanan publik Pemerintah Kab/Kota se-DIY.

Sumber: Hasil analisis, 2023

Berbagai masalah yang dihadapi dalam penyediaan layanan publik seperti (1) terbatasnya *sharing* data sektoral pemerintah antar OPD Pemda DIY dan Kab/Kota. (2) kurangnya komunikasi internal antar lembaga, data yang tidak memadai. (3) perlunya peningkatan kinerja pemda melalui implementasi *Smart Governance*, dan (4) payung hukum yang mendukung penerapan *Smart Governance* belum terimplementasikan dengan baik menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di DIY. Secara umum, penerapan konsep *smart* dalam mewujudkan tata kelola daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan pengembangan sistem informasi pemerintahan terintegrasi, serta *platform e-government* untuk menyediakan layanan publik secara online, termasuk pendaftaran, perizinan, dan pembayaran pajak dalam satu *platform* mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik. Selain itu, adanya platform *Big Data Analytics* tentunya juga dapat memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dalam memahami kondisi perkotaan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam sub-dimensi layanan publik, pendefinisian standar data dan metadata pokok yang berlaku untuk Pemerintah Kab/Kota se-DIY, pemanfaatan *platform* portal layanan publik berbasis *Single Sign On* (SSO), Sosialisasi program *smart governance* yang

berkelanjutan dan optimalisasi atas digitalisasi layanan yang ada dengan melakukan simplifikasi alur proses bisnis layanan publik menjadi strategi yang diperlukan dalam mewujudkan *smart governance*.

Lebih jauh di sisi birokrasi, guna mewujudkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien diperlukan berbagai strategi seperti (1). penyiapan SDM digital. (2). penguatan pemahaman dan *mindset* transformasi digital. (3). penguatan budaya kerja. (4). efisiensi alur birokrasi layanan publik dan (5). *review* kelembagaan DIY. Dengan mengimplementasikan strategi ini, pemerintah dapat menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan efisien, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan memajukan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Selanjutnya di sisi kebijakan. Diperlukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang *Smart Province*, tentang SPBE, dan tentang Satu Data. Sosialisasi peraturan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami, mendukung, dan mematuhi peraturan yang diberlakukan. Sosialisasi peraturan tidak hanya dapat memberikan pemahaman tentang ketentuan peraturan itu sendiri, tetapi juga membantu mengkomunikasikan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari penerapan peraturan tersebut. Sosialisasi peraturan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti: gelar kampanye edukasi publik yang informatif, memanfaatkan *platform* media sosial untuk menyampaikan informasi peraturan kepada masyarakat, pendekatan melalui komunitas lokal, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat untuk membantu menyampaikan informasi peraturan, *workshop* dan pelatihan untuk kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak oleh peraturan, fasilitasi diskusi dan simulasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan manfaat, dan sosialisasi peraturan berkelanjutan. Dengan menggunakan strategi ini, sosialisasi peraturan dapat menjadi lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan dukungan masyarakat, sehingga peraturan dapat diterapkan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif sesuai yang diharapkan.

Jika ditinjau berdasarkan dari misi *Smart Province* maka dimensi *Smart Governance* termasuk kedalam misi ke 1 yakni mengoptimalkan layanan digital dalam kerangka PANCAMULIA. Dimensi ini memiliki sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan kebijakan publik yang efektif.

3.2. Smart Branding

Secara umum, *Smart Branding* terdiri dari tiga sub-dimensi yakni sub-dimensi Wajah Kota (*City's Appearance*), Daya Saing Bisnis dan Promosi Budaya, dan Pariwisata (*Tourism*). Namun, mengingat DIY merupakan wilayah yang memiliki akar kebudayaan yang kuat dan menjadi pilar dari segala aspek pembangunan, maka pada dimensi *Smart Branding*, aspek kebudayaan (*culture*) menjadi landasan dalam pengembangan strategi di setiap sub dimensi. Dimensi *Smart Branding* termasuk kedalam misi 2, yaitu menguatkan dan memasarkan *city branding* DIY. Dimensi ini memiliki sasaran untuk meningkatkan daya saing daerah baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Tabel 3. 2 Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sub Dimensi	Strategi
Wajah Kota (<i>City's Appearance</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi cagar dan warisan budaya sebagai aset dan destinasi pariwisata provinsi
Daya Saing Bisnis & Promosi Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Utilisasi teknologi untuk pengembangan sektor bisnis dan promosi investasi di bidang seni dan kebudayaan• Pemberdayaan masyarakat dan pelaku pemajuan budaya dalam ekosistem kebudayaan yang dapat mengangkat potensi lokal dan solidaritas sosial• Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan pendidikan yang berbasis nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta
Pariwisata (<i>Tourism</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan atraksi dan promosi pariwisata• Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan dalam mendukung pelestarian, pengembangan, dan perlindungan kearifan lokal sampai pada tingkat daerah kabupaten/kota

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dalam pengembangan *place branding*, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu (1) *Attributes*: penggambaran sebuah karakter, daya tarik, gaya, dan personalitas kota/provinsi; (2) *Message*: menggambarkan sebuah cerita yang menyenangkan dan mudah diingat; (3) *Differentiation*: hal yang unik dan berbeda dari kota atau provinsi yang lain; (4) *Ambassadorship*: menginspirasi orang untuk tinggal di kota atau provinsi tersebut.

Yogyakarta, sebagai sebuah provinsi, memiliki status “daerah istimewa” dengan kebudayaannya yang menjadi dasar dalam merumuskan *branding*. Dalam hal ini, penyusunan *positioning* suatu kota atau provinsi, harus memiliki beberapa dasar penentuan, antara lain: manfaat, pencapaian, atribut dan produk. DIY memberikan janji berupa keistimewaan daerah yang berlandaskan nilai kebudayaan yang sangat kental dan unik, sehingga diferensiasi yang ditonjolkan dari DIY adalah pada aspek budaya.

DIY merupakan perpanjangan dari Kasultanan Yogyakarta dan masih kuatnya kebudayaan dari peradaban masa lalu yang sampai sekarang masih dipertahankan seperti kehidupan sosial, kesenian, upacara adat, dan pemikiran yang diyakini oleh masyarakat. Selain itu, pariwisata DIY menjadi aspek diferensiasi karena atraksi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam sampai dengan wisata kebudayaan yang menarik banyak turis untuk datang menikmatinya. Di sisi lain, adanya sistem dengan peran serta masyarakat untuk mengelola dan memasarkan potensi wisata di wilayahnya beserta produk unggulan wilayahnya menjadi aspek yang menguatkan *branding* DIY.

Kuatnya *branding* DIY dalam aspek pariwisata dan kebudayaan, bukan berarti tidak ada permasalahan ataupun tantangan. *Branding* DIY “Jogja Istimewa” bukan hanya *tagline*, namun juga menjadi pelindung segala aspek yang ada didalamnya, termasuk produk komoditi sehingga tidak diambil alih oleh wilayah lain. Untuk itu, diperlukan kerjasama lintas sektor, kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi isu strategis yang ada. Dengan adanya kerjasama lintas sektor, terciptalah kolaborasi, integrasi, dan harmonisasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penggunaan dan pelaksanaan *branding* DIY, sehingga menguatkan *positioning* dari *branding* DIY. “Jogja Istimewa” dalam hal ini menjadi induk dari *sub-branding* pariwisata (Visiting Jogja) dan kebudayaan (Sumbu Filosofi).

Potensi wisata alam, kebudayaan yang unik dan berbeda dengan wilayah lain serta kemudahan akses merupakan dasar untuk menarik pelanggan daerah. DIY dengan segala potensi dan keunikannya, berhasil menarik pelanggan daerah yang terdiri dari *Tourist, Traders, Investor – Talent, Developer, dan Organizer*. Sehingga, DIY memiliki prestasi sebagai kota dengan tempat *Meeting Incentive Convention Exhibition* (MICE) terbaik yang kemudian semakin mengangkat pariwisata di mata publik.

Sebagai pendukung kegiatan pariwisata, diperlukan pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar yang merata di seluruh DIY, penyertaan pemerataan akses serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal fundamental. Aplikasi Visiting Jogja, menyuguhkan informasi mengenai destinasi wisata sampai dengan rencana kerja dan *event-event* yang akan

diselenggarakan di DIY serta memberikan informasi daya dukung dan daya tampung kawasan wisata untuk menjaga obyek wisata supaya berkelanjutan. Walaupun telah ada aplikasi Visiting Jogja, namun terdapat beberapa aplikasi lain yang sebagai pendukung, untuk itu, diperlukan pengaturan dan integrasi antar aplikasi agar tidak membebani wisatawan. Selain itu, diperlukan pengelolaan aplikasi ini agar fitur-fitur yang ada didalamnya menjadi optimal dan setelahnya perlu adanya evaluasi penggunaan, anggaran, operasional, dan rencana pengembangan, sehingga terdapat peralihan bisnis modal dan proses bisnis dalam aplikasi tersebut. Masyarakat sebagai *end user* aplikasi promosi wisata dan model bisnisnya, harus dibimbing sebagai bentuk dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang *awareness* terhadap *branding* dan literasi digital.

Salah satu kekayaan terbesar DIY adalah sumber daya manusianya yang memiliki potensi kreativitas yang tinggi. Sebagai langkah awal, diperlukan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada sektor industri kreatif. Hal ini bisa meliputi kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, serta pihak-pihak relevan lainnya untuk menyediakan kurikulum yang *up-to-date*, menghadirkan mentor-mentor yang berpengalaman, serta memberikan akses kepada sumber belajar terbaru. Dengan demikian, sumber daya manusia di DIY akan lebih siap dalam menghadapi persaingan di era digital dan memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri.

Untuk mendorong pertumbuhan start-up, diperlukan adanya pusat inkubasi yang dapat membantu start-up dalam tahap awal pengembangan ide dan bisnis. Selain itu, pusat akselerasi dapat membantu start-up yang sudah berjalan untuk meningkatkan skala usahanya. Dengan dukungan pemerintah DIY, pusat-pusat ini bisa menyediakan fasilitas, pendanaan awal, serta jaringan yang diperlukan oleh para pendiri start-up. Selain itu, melalui pusat inkubasi dan akselerasi ini, start-up di DIY dapat terkoneksi dengan investor, mentor, dan pelaku industri lainnya yang dapat membantu pertumbuhan mereka.

Sebuah ekosistem start-up yang sehat memerlukan lingkungan bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah DIY perlu melakukan revisi dan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan pendirian dan operasional start-up, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, pendorongan kolaborasi antara start-up, korporasi besar, pemerintah, dan komunitas dapat meningkatkan inovasi dan pertukaran ide. Pemerintah juga bisa menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan berbagai acara, seminar, dan workshop yang mempertemukan pelaku start-up dengan potensi mitra dan klien mereka. Dengan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, ekosistem start-up di sektor industri kreatif DIY diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Untuk mengembangkan pemasaran potensi investasi dan pariwisata Yogyakarta, harus ada integrasi aplikasi secara vertikal, dari tingkat provinsi sampai level kabupaten/kota, yang berkelanjutan namun tidak mematikan identitas dan kreativitas daerah. Integrasi secara horizontal juga perlu dilakukan melalui sinergi lintas bidang dan antar *stakeholders* terkait agar saling mendukung, Masih banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri dan tumpang tindih dapat berakibat pemanfaatannya tidak efektif. Selain itu, pemasaran wisata Yogyakarta dan segala potensi ekonomi kreatifnya, tidak hanya dilakukan dengan skala lokal maupun nasional namun juga internasional, sehingga diperlukan pemasaran eksistensi Yogyakarta di kancah internasional.

Pengembangan potensi investasi dan wisata harus disinkronkan dengan arah pembangunan DIY yang sekarang memiliki kecenderungan ke arah selatan. Sehingga perlu adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi pariwisata yang mendukungnya. Salah satunya dengan mengembangkan *ecotourism* di Selatan DIY, titik peristirahatan atau pertemuan antar moda transportasi dapat di konsep untuk promosi wisata dan dikembangkan menjadi spot wisata yang sesuai dengan karakteristik lokal yang didukung dengan karakter desain kawasan sebagai *branding* yang tidak perlu seragam namun masih menunjukkan kesamaan identitas sebagai kesatuan kebudayaan. Paket wisata yang menawarkan pengalaman (*experience*) bagi pengunjung dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke DIY, sehingga para wisatawan tidak hanya menikmati obyek wisata yang ada namun juga mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan destinasi wisata lainnya.

Untuk mendukung potensi investasi, sektor pariwisata, budaya, dan pendidikan, serta kehidupan yang berkelanjutan, pangan menjadi salah satu faktor utama, swasembada pangan menjadi faktor kuncinya. Karena kuliner juga menjadi bagian dari tujuan wisatawan karena memiliki daya tarik khusus ketika wisatawan memutuskan untuk mengunjungi destinasi wisata, yakni nilai historis dan sebagai *transfer knowledge* tentang nilai-nilai kebudayaan dan filosofi wilayah tersebut. Berbagai negara saat ini sedang berupaya mengembangkan wisata kuliner untuk memberikan pengalaman citarasa dan budaya kepada wisatawan atau disebut dengan wisata *gastronomy*. Namun pengembangannya masih mengalami kendala karena belum optimalnya edukasi nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan etnis, sementara masyarakat *urban* yang cenderung konsumtif, semakin jarang bersentuhan dengan identitas kelokalannya. Pengembangan wisata gastronomi akan memperkuat identitas lokal dan regional serta menjadi poin penting untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan didukung oleh perkembangan IT di sektor *platform* digital untuk mempromosikan produk dan pengalaman wisata. Pemerintah sendiri telah

melaksanakan wisata gastronomi melalui *gastronomy diplomacy* di berbagai *event* dan atraksi seni budaya di luar negeri.

3.3. Smart Economy

Secara umum, *Smart Economy* terdiri dari tiga sub dimensi yakni ekosistem industry, kesejahteraan rakyat, dan transaksi keuangan. Dimensi *Smart Economy* termasuk dalam misi 4 yaitu mendorong penguatan dan pemerataan ekonomi yang berbasis karakteristik sumberdaya ekonomi lokal. Dimensi *Smart Economy* di dalam *smart province* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Tabel 3. 3 Strategi Dimensi Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi
Ekosistem Industri (<i>Industry</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis internet dalam mendukung aktivitas industri • Kemudahan layanan konsultasi bisnis • Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) • Kemudahan layanan aduan konsumen
Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran atas produk unggulan DIY yang berkualitas untuk berbagai sektor seperti produk pariwisata, kerajinan, agro, industri melalui <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i>. • Mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru • Peningkatan Ketercukupan Bahan Baku
Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun ekosistem transaksi keuangan digital menuju masyarakat <i>cashless</i>;

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pendapatan daerah dapat diukur melalui komponen: *consumption, government spending, investment, (export – import)*. Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam narasi pembangunan, sebab investasi memiliki dampak yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mendapatkan investasi yang optimal, diperlukan adanya iklim investasi yang kondusif. Ketika pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, investasi akan meningkat dan berdampak positif pada proses produksi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan memberikan pajak yang besar bagi pemerintah. Sehingga untuk menjawab permasalahan menurunnya tingkat

perekonomian di Kabupaten Kulon Progo karena berakhirnya masa pembangunan *Yogyakarta International Airport (YIA)* dan kesenjangan wilayah utara dengan selatan DIY, salah satunya dapat didekati oleh menawarkan *investment project ready to offer* kepada penanaman modal, dunia usaha/industri dan mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis sumber daya lokal.

Pemerintah telah melakukan program-program *debottlenecking* investasi, debirokratisasi, deregulasi, sampai peluncuran paket investasi karena ketertarikan investor ditentukan oleh tawaran fasilitas dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. agar investasi dapat dapat dilaksanakan sampai di level pemerintah daerah, maka DIY juga merancang dan menerapkan kebijakan insentif dan kemudahan berusaha, termasuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah.

Dalam rangka penyerapan investasi, industri merupakan sektor yang dapat menyerap investasi dengan optimal untuk menghasilkan *multiplier effect* yang besar, baik untuk wilayah maupun secara nasional. untuk menumbuhkan ekosistem industri, maka dalam Rencana Induk Pembangunan Industri baik nasional maupun daerah diperlukan adanya integrasi antara kelembagaan, peraturan dan perundangan perizinan, tata ruang termasuk pengelolaan lingkungan, infrastruktur dan aksesibilitas, pasar tenaga kerja, komoditas bahan baku, pasar, serta aturan perpajakan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah aspek stabilitas keamanan dan politik. Terkait peraturan, diperlukan peraturan yang fleksibel sesuai dengan masa transisi revolusi industri 4.0 dan pasca pandemi Covid-19, dimana kondisi yang ada masih sangat dinamis. Pandemi Covid-19 memberikan dampak sebuah disrupsi dan ancaman bagi berbagai macam sektor kehidupan, salah satunya sektor ekonomi khususnya sektor industri. Namun adanya kesenjangan teknologi, perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan internet, akses teknologi, kurangnya literasi digital, serta kurang sinergi dan dukungan pemerintah daerah, serta keamanan data yang masih menjadi penghambat perkembangan industri digital kreatif di DIY. Sehingga, infrastruktur akses internet, keamanan data, *internet of Things (IoT)*, dan jaringan jalan menjadi dasar layanan dalam pengembangan industri yang disesuaikan dengan potensi wilayah setempat.

Tenaga kerja juga menjadi aspek yang harus diperhatikan pada masa transisi ini, dimana banyak dari tenaga kerja di beberapa bidang tergantikan oleh mesin. Ketika adanya perpindahan tenaga kerja yang berasal dari industri manufaktur konvensional ke industri kreatif, industri pariwisata, maupun ke sektor perdagangan digital, harus diiringi dengan pendampingan dan pelatihan untuk mengurangi adanya pengangguran, karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit. Di sisi lain, pendidikan vokasi dan *long life learning*

menjadi ujung tombak dalam peningkatan kapasitas SDM dalam *Smart Economy* DIY.

Kesenjangan antar wilayah dapat terjadi ketika adanya *mismatch* antara potensi wilayah dan investasi, sehingga untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, diperlukan adanya pengembangan pusat perekonomian baru yang sesuai dengan potensi wilayah tanpa mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mengarah pada pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui industri pariwisata melalui *ecotourism*.

Percepatan penanggulangan kemiskinan di DIY dilakukan dengan mendukung usaha kecil menengah dan pengembangan usaha masyarakat, terutama di kawasan kantong-kantong kemiskinan. Pemasaran produk lokal yang dihasilkan oleh industri kreatif di skala kecil dan menengah yang mendukung industri pariwisata, melalui platform digital. Dukungan pemerintah DIY berupa pendataan, pelatihan, bantuan permodalan, kemitraan dan jejaring bagi IKM, hingga standarisasi produk, akan memberikan dampak yang besar untuk mengembangkan potensi wilayah, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Namun, tantangan baru yang dihadapi adalah isu *income trap* dan *cross border* mengingat Indonesia masih kesulitan untuk melakukan pemasaran produknya di luar negeri.

Sesuai dengan perkembangan teknologi di seluruh lini kehidupan, sistem keuangan merupakan aspek yang pertama kali terdampak dengan adanya digitalisasi, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat. Maraknya sistem perdagangan dan pembayaran online juga menjadi salah satu pemicu *cashless society*. Salah satunya adanya fenomena *cashless society* yang dimulai dari tahun 2014 dengan Bank Indonesia sebagai pencetusnya melalui pembayaran toll dengan *e-money*. *Cashless Society* merupakan kondisi dimana masyarakat sudah tidak lagi menggunakan uang tunai namun telah berbentuk alat penyimpanan keuangan, baik dalam bentuk uang elektronik (*e-wallet*), QRIS, maupun kartu debit dan kredit. namun, masih banyak kelompok masyarakat yang masih belum terlayani oleh jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*). DIY terkenal dengan sektor wisatanya, berhasil mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri dan luar negeri. namun transaksi *cashless* belum terintegrasi untuk semua perbankan di seluruh dunia.

Walaupun *cashless* memiliki banyak keuntungan seperti meminimalisir peredaran uang palsu, terhindar dari tindak kriminal akibat membawa uang fisik, transaksi keuangan lebih mudah dan aman, dan mempercepat perputaran ekonomi, namun sistem *cashless* harus memperhatikan bahwa Indonesia masih belum memiliki regulasi inklusif yang mengatur keamanan transaksi *cashless*. Disisi lain, walaupun penggunaan *cashless* meningkat namun literasi keuangan

masih belum merata karena rendahnya tingkat edukasi dan minimnya akses internet. Konsumen masih dikenakan dengan biaya administrasi untuk menikmati layanan pembayaran non tunai, terutama saat melakukan transfer, top up, atau pembayaran tertentu. Begitu pula para pedagang yang keberatan atas kebijakan Bank Indonesia yang mengenakan biaya layanan QRIS sebesar 0,3 persen per 1 Juli 2023. Namun, risiko paling besar adalah terkait keamanan data untuk menghadapi *cyber crime* seperti *skimming*.

3.4. Smart Living

Dimensi *Smart Living* bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat baik dari aspek fisik (tata ruang), kesehatan, dan transportasi sehingga berupaya untuk meningkatkan kualitas baik dari segi infrastruktur dasar, kualitas fasilitas kesehatan masyarakat dan berbagai bentuk penunjang kegiatan masyarakat. Dimensi ini terdiri dari tiga sub dimensi yaitu harmonisasi tata ruang (*harmony*), kesehatan (*health*), dan transportasi (*mobility*). Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan *Smart Living* Provinsi DIY, yakni:

Tabel 3. 4 Strategi Dimensi Smart Living

Sub Dimensi	Strategi
Harmonisasi tata ruang (<i>harmony</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi tata ruang terintegrasi • Aplikasi penanganan RTLH yang terintegrasi dengan Kab/Kota • Tata Ruang yang mengakomodasi kawasan budidaya pertanian melalui pembangunan sistem keamanan pangan
Kesehatan (<i>health</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya integrasi layanan portal satu data kesehatan • Pengembangan layanan <i>hotline</i> kesehatan
Transportasi (<i>mobility</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan transportasi di tingkat Provinsi yang mampu mem-<i>backup</i> dan mengakomodir Kab/Kota khususnya untuk mendukung <i>Smart Living</i> • Pengelolaan manajemen transportasi (akses transportasi umum pindah moda, kewenangan pengelolaan transportasi, parkir).

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara umum, permasalahan penataan tata ruang dimana substansi data spasial terkait *sultan ground* yang tidak sama, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai aturan tata ruang, belum adanya integrasi Sistem Informasi Perumahan dan aplikasi penanganan RTLH, adanya perebutan lahan untuk lahan pertanian, belum terintegrasinya data rekam medik, banyaknya aplikasi kesehatan yang belum terintegrasi, belum terdapatnya layanan *hotline* kesehatan, transportasi umum belum memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna, banyaknya

masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan kecenderungan masyarakat perkotaan dalam pemanfaatan moda transportasi umum, dan adanya akses untuk transportasi logistik yang masih kurang menjadi kendala di DIY.

Penataan tata ruang daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Guna menjaga keberlangsungan, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang. Tidak terkecuali dalam penanganan rumah tidak layak huni, diperlukan upaya pemetaan dan identifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perencanaan tata ruang kota yang mendukung pengembangan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan kota untuk mencegah kemunculan rumah tidak layak huni di masa depan, penguatan kapasitas masyarakat, pelatihan dan pendidikan masyarakat, serta kolaborasi berbagai *stakeholder* dalam mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi. Selain itu, diharapkan tata ruang yang ada dapat mengakomodasi kawasan budidaya pertanian melalui pembangunan sistem keamanan pangan. Dengan mengimplementasikan berbagai strategi ini, diharapkan permasalahan penataan ruang dan penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan perumahan yang lebih baik.

Lebih jauh, dalam mengatasi berbagai permasalahan khususnya dalam sub-dimensi kesehatan (*health*) diperlukan berbagai strategi yang diperlukan, seperti: perlunya integrasi layanan portal satu data kesehatan, dan pengembangan layanan hotline kesehatan. Adanya *telemedicine* dan teknologi kesehatan membantu meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan memungkinkan konsultasi jarak jauh antara pasien dan tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan integrasi *platform* kesehatan digital untuk mengelola rekam medis elektronik, memfasilitasi pendaftaran online, dan memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan sistem informasi kesehatan elektronik dapat menyederhanakan manajemen data pasien. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memberikan akses yang lebih baik kepada warga.

Selanjutnya dalam mewujudkan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, diperlukan penyusunan kebijakan transportasi dan manajemen transportasi sebagai salah satu upaya penyediaan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk penerapan teknologi untuk memantau, mengatur lalu lintas, serta fasilitasi layanan transportasi publik dan pemesanan *online* untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Berbagai kombinasi

strategi dalam *Smart City* diharapkan dapat mencapai hunian yang layak, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan teknologi dan kebijakan yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk di DIY.

Ditinjau berdasarkan misi *smart province*, dimensi *Smart Living* termasuk dalam Misi 5 yaitu menciptakan keharmonisan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan *sustainable*. Dimensi ini memiliki sasaran terwujudnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi, meningkatkan pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang, terwujudnya sinergitas dan kolaborasi dalam sistem informasi kesehatan, dan meningkatnya kualitas transportasi publik.

3.5. *Smart Society*

Dimensi *Smart Society* bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berorientasi pada kemanusiaan, aktif, produktif, berkomunikasi dengan baik, interaktif, serta memiliki tingkat literasi yang tinggi. Di dalam dimensi *Smart Society* terdapat 3 sub-dimensi yaitu Interaksi Masyarakat (*Community*), Ekosistem Belajar/Pendidikan (*Learning*), dan Keamanan Masyarakat (*Security*). Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan *Smart Society* Provinsi DIY, yakni:

Tabel 3. 5 Strategi Dimensi *Smart Society*

Sub Dimensi	Strategi
Interaksi Masyarakat (<i>Community</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM • Penanganan masalah sosial berbasis penguatan budaya, keluarga, dan restorasi sosial
Ekosistem Belajar/ Pendidikan (<i>Learning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sinergi <i>pentahelix</i> yang mengkolaborasikan kampus, kampung, komunitas, <i>corporate</i>, dan pemerintah untuk penguatan budaya dan literasi data dan digital.
Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kebijakan dan media tanggap bencana serta perlindungan kekerasan.

Sumber: Hasil analisis, 2023

Masyarakat DIY memiliki kekhasan yang hanya dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia: kekuatan budaya dan tradisi yang melingkupinya. Salah satu bentuk manifestasi Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa adalah keamatan internalisasi budaya Jawa dalam kehidupan keseharian masyarakat. Jika budaya dipandang sebagai aset nasional yang penting, maka kondisi ini perlu dijaga dan dirawat kelestariannya. Interaksi masyarakat ini kemudian dimanfaatkan sebagai

basis untuk penguatan daya saing masyarakat yang ditempuh melalui berbagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menyebabkan arus informasi mengalir ke semua arah tanpa bisa dibatasi. Banjir informasi ini membawa banyak eksese, salah satunya adalah masuknya budaya-budaya baru ke masyarakat. Penetrasi budaya baru ini bertemu dengan budaya lokal, dan pertemuan ini bisa membawa dampak buruk: budaya lokal tergerus oleh budaya impor. Dimensi *Smart Society* mencermati kondisi ini, sehingga salah satu usulan strategi untuk meningkatkan ketahanan budaya lokal adalah penguatan pemahaman terhadap budaya Jawa bagi generasi muda dan menyiapkan instrumen regulasi untuk menghadapi pergeseran budaya ini.

Derasnya arus informasi juga membawa permasalahan berupa ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengelola berbagai informasi yang diterimanya. Kasus-kasus merebaknya hoax, korban-korban kejahatan siber (penipuan online, dan sebagainya), sampai ke provokasi-provokasi yang berdampak buruk menunjukkan bahwa ketahanan informasi sebagian dari masyarakat DIY masih perlu ditingkatkan. Ini yang melatarbelakangi dimensi *Smart Society* untuk juga memperhatikan pentingnya pendekatan kolaboratif antar sektor untuk meningkatkan ketahanan informasi masyarakat.

Terkait dengan ekosistem pembelajaran bagi masyarakat, salah satu isu pentingnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Bukan hanya pendidikan formal, namun juga pendidikan informal yang terkait dengan penguatan karakter bagi generasi muda. Fenomena '*klithih*' dan tindakan-tindakan kriminal atau tidak etis lain yang dilakukan oleh generasi muda menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai luhur di kalangan masyarakat. Dimensi *Smart Society* merespon kondisi ini dengan menawarkan strategi restorasi sosial yang berbasis masyarakat. Artinya, justru elemen-elemen masyarakat yang lebih banyak berperan dalam upaya penumbuhan kembali nilai-nilai luhur, yang dikemas dalam kolaborasi multi-pihak.

3.6. *Smart Environment*

Dimensi *Smart Environment* atau lingkungan yang cerdas merupakan bagian penting dalam konteks perencanaan *Jogja Smart Province*. Secara umum tujuan dari dimensi ini adalah untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup pada setiap pembangunan di DIY. Dengan *Smart Environment* diharapkan lingkungan hidup di DIY dapat memiliki keberlanjutan dan inklusif. Penerapan lingkungan cerdas lebih detail dibagi menjadi tiga sub-dimensi yaitu sub-dimensi proteksi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta tata kelola energi. Berikut strategi yang digunakan untuk mewujudkan *Smart Environment* di DIY, yakni:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 6 Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sub Dimensi	Strategi
Proteksi lingkungan (<i>environmental protection</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sistem tata kelola lingkungan dengan penggunaan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air dan udara• Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup• Penanganan terintegrasi untuk kawasan pesisir DIY• Melakukan konservasi dan restorasi hutan mangrove, cemara udang dan anggur laut di wilayah pesisir DIY• Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha sektor wisata untuk mengolah sampah secara mandiri
Pengelolaan sampah dan limbah (<i>waste management</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan sosialisasi dan pendampingan kegiatan pemilahan sampah• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)• Pengembangan peran serta 5K (Kampung – Kampus – pemerintah Kota – Korporasi – Komunitas) dalam pencapaian kinerja sistem pengelolaan sampah.• Mengoptimalkan pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dengan unit pengelolaan sampah dan bank sampah untuk memanfaatkan sampah untuk perekonomian warga.
Tata kelola energi (<i>energy</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan daur ulang sampah menjadi bahan produksi energi yang ramah lingkungan• Pengembangan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, gelombang laut dan air• Tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan

Sumber: Hasil analisis, 2023

Berbagai tantangan yang dihadapi DIY pada permasalahan lingkungan memang kompleks dan perlu ditemukan solusi baik dengan strategi yang tepat. Tantangan-tantangan yang ada antara lain kurangnya ruang terbuka hijau publik, menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, meningkatnya pencemaran air, dan kondisi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) berada di bawah nilai IKLH nasional. Salah satu strategi yang bisa diupayakan dengan mengembangkan sistem tata kelola lingkungan menggunakan teknologi untuk pelaporan dan *monitoring* pencemaran tanah, air dan udara.

Wilayah pesisir DIY memiliki potensi sumberdaya alam yang belum optimal dimanfaatkan, yang perlu penanganan terintegrasi untuk kawasan pesisir DIY. Permasalahan Sampah dan Limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal,

Keterbatasan penggunaan energi baru terbarukan. Strategi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan limbah, antara lain dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), pengembangan peran serta 5K (Kampung – Kampus – pemerintah Kota – Korporasi – Komunitas) dalam pencapaian kinerja sistem pengelolaan sampah. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha sektor wisata untuk mengolah sampah secara mandiri, Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga terkait pengelolaan sampah TPS3R. Untuk sub dimensi energi diperlukan strategi pengembangan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, gelombang laut dan air serta pemanfaatan daur ulang sampah menjadi bahan produksi energi yang ramah lingkungan.

BAB IV
RENCANA AKSI JOGJA *SMART PROVINCE*

A. Rencana Aksi Jogja *Smart Province*

Rencana aksi Jogja *Smart Province* merupakan tindakan turunan dari program kerja yang bertujuan untuk menunjang terlaksana serta tercapainya sasaran dari pelaksanaan inovasi yang tertuang dalam Peta Jalan Pembangunan Jogja *Smart Province*. Perumusan Rencana Aksi Pembangunan Jogja *Smart Province* menjadi salah satu bagian yang krusial dan penting dalam penyusunan Rencana Induk Jogja *Smart Province*. Desain rencana aksi dalam Rencana Induk Jogja *Smart Province* menunjukkan komprehensivitas DIY dalam menyiapkan eksekusi program-program inovatifnya. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan dan kapan kegiatan persiapan tersebut akan dijalankan.

Rencana aksi Jogja *Smart Province* dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk aksi, yaitu: Pengembangan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan infrastruktur pendukung, pengembangan perangkat lunak, dan penguatan literasi. Tiap aspek dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut.

1. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan

Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *Smart Province* adalah langkah penting menuju pemerintahan yang efisien, berkelanjutan, dan inovatif. Kebijakan *Smart Province* dapat diartikan sebagai serangkaian langkah, regulasi, dan inisiatif yang diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan layanan publik, efisiensi administrasi, partisipasi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Kebijakan *Smart Province* bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, keberlanjutan, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Adapun secara lebih detail, pengembangan kebijakan dalam *Smart Province* sebagai berikut:

- a. Penyusunan regulasi berupa Peraturan Gubernur, SK Gubernur, Peraturan Daerah, dll sebagai landasan dalam implementasi Jogja *Smart Province*;
- b. Penetapan visi, misi, dan sasaran Jogja *Smart Province*;
- c. Penyusunan pedoman maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan berbagai program inovasi di DIY;
- d. Kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi atau sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY;
- e. Kebijakan terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program *Smart Province*; dan

- f. Berbagai bentuk kebijakan yang relevan dan mendukung implementasi *Jogja Smart Province*.

Selain aspek kebijakan, aspek kelembagaan dalam *Smart Province* juga penting. Rencana aksi kelembagaan melibatkan pembentukan atau restrukturisasi lembaga untuk mendukung implementasi program/kegiatan inovatif yang diusulkan dalam Rencana Induk *Jogja Smart Province*. Pembentukan entitas kelembagaan diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan keberadaan lembaga yang diperlukan untuk merencanakan, mengelola, dan memonitor implementasi program kerja *Smart Province* dengan efektif. Pada level pengorganisasian *Smart Province* DIY telah ditetapkan beberapa kelembagaan yang bersifat mendasar, yaitu: 1) Pembentukan Dewan *Jogja Smart Province* yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/TIM/2023 tentang Dewan *Jogja Smart Province*, 2) Pembentukan Tim Pelaksana *Jogja Smart Province* yang telah terbentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/TIM/2023, dan 3) Pembentukan Pokja *Jogja Smart Province* yang telah tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 61/TIM/2023. Lembaga-lembaga ini yang menjadi suprastruktur persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi *Smart Province* di DIY. Meskipun demikian, kelembagaan dalam *Jogja Smart Province* tidak terbatas pada ketiga lembaga di atas. Entitas-entitas kelembagaan baru, baik formal maupun informal, dapat saja dibentuk untuk mendukung sebuah inovasi. Entitas-entitas kelembagaan ini tidak harus dikelola oleh pemerintah, namun bisa juga oleh masyarakat.

2. Pengembangan infrastruktur pendukung

Pengembangan infrastruktur pendukung dalam *Smart Province* merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi *Smart Province* yang mencakup berbagai fasilitas dan sistem yang mendukung terwujudnya program inovasi *Jogja Smart Province*. Adapun beberapa bentuk pengembangan infrastruktur pendukung yaitu:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung guna memudahkan masyarakat dalam menerima layanan;
- b. Pembangunan *prototype* inovasi;
- c. Pengadaan perangkat TIK;
- d. Pengadaan bank sampah terpadu demi menjaga kebersihan lingkungan;
- e. Revitalisasi dan pembangunan armada (bus listrik dan becak non listrik) guna memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan melakukan mobilisasi;
- f. Jenis-jenis infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengembangan perangkat lunak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perangkat lunak atau biasa disebut *software* merupakan serangkaian program komputer, prosedur, dan atau dokumentasi yang digunakan dalam menjalankan sistem elektronik. Perangkat lunak yang dimaksud dalam rencana aksi pembangunan *Smart Province* yaitu sistem informasi atau sistem elektronik yang dikembangkan oleh masing-masing OPD di Kab/Kota maupun Provinsi. Pengembangan perangkat lunak dalam hal ini merupakan pengembangan sistem informasi dapat berbasis sistem informasi *website*, sistem informasi *mobile/android* ataupun berbasis desktop.

Tidak dapat dipungkiri, perangkat lunak (software) atau aplikasi (baik *desktop*, *web*, maupun *mobile*) adalah wujud nyata dari banyak inovasi yang dapat dimunculkan dalam program-program *smart province*. Perangkat lunak atau aplikasi adalah representasi dari pemanfaatan TIK yang sering diidentikkan dengan inovasi *smart province*, sehingga wajar bila rencana aksi dari berbagai inovasi banyak melibatkan pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Meskipun demikian, ada beberapa prinsip penting dalam penguatan dukungan perangkat lunak bagi Jogja *Smart Provinces* yang perlu diperhatikan:

- a. Pengelompokan aplikasi-aplikasi yang mewujudkan berbagai layanan publik ke dalam sebuah *super app* yang berperan sebagai platform layanan publik yang mudah dijangkau dan digunakan. Dengan konsep *super app* ini, masyarakat tidak perlu repot mencari aplikasi untuk layanan yang mereka perlukan.
- b. Prinsip integrasi layanan (dan aplikasi pendukungnya) perlu didorong semaksimal mungkin. Integrasi layanan harus didorong oleh proses bisnis layanan, pengembangan atau integrasi aplikasi pendukung layanan harus mengikuti *requirements* dari proses bisnisnya. Dalam hal ini, situasi lintas organisasi, bahkan lintas pemerintahan, perlu diakomodasi dengan baik. Sebagai contoh, integrasi layanan pariwisata bisa melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelola destinasi wisata, dan dengan penyelenggara tour/travel.
- c. Yang tidak kalah penting adalah integrasi data yang menjadi basis dari berbagai layanan (terutama layanan publik) dan proses-proses pengambilan kebijakan (dalam bentuk dashboard bagi pimpinan). Integrasi data harus mampu menjangkau seluruh simpul-simpul jaringan dan data yang ada di DIY.

4. Penguatan literasi

Literasi *Smart Province* sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat dan aparat tentang pentingnya implementasi *Smart Province*. Penguatan literasi *Smart Province* menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan Jogja *Smart Province*. Pemda DIY akan berkolaborasi dengan beberapa pihak antara lain dengan akademisi, dunia usaha, aparat pemerintahan, elemen masyarakat dan kekuatan sosial lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi dalam bentuk sosialisasi untuk memperkenalkan dan memanfaatkan konsep *Smart Province* secara efektif dan efisien. Dengan peningkatan literasi *Smart Province* diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan konsep *Smart Province*. Penguatan literasi masyarakat terhadap *Smart Province* dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi melalui media sosial antara lain Tiktok, youtube, twitter, instagram, facebook dan whatsapp;
- b. Sosialisasi melalui media elektronik : TV, radio dan *website*;
- c. Sosialisasi melalui media cetak dalam bentuk brosur dan leaflet; dan
- d. Sosialisasi melalui pertemuan rutin yang ada di masyarakat, forum kelompok sosial.

Penguatan literasi *Smart Province* disamping dilakukan dengan sosialisasi diperlukan juga *focus group discussion* untuk pengembangan aplikasi dan layanan publik *online* pada saat awal pengembangan, pada saat uji coba, dan pada saat implementasi dari aplikasi tersebut. Langkah berikutnya menyelenggarakan bimtek untuk penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi tersebut.

Rincian rencana aksi Jogja *Smart Province* untuk tiap dimensi *Smart Province* dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Smart Living

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
1	Tata Ruang yang mengakomodasi kawasan budidaya pertanian melalui pembangunan sistem pertanian	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	<i>Inovasi budidaya sambung samping (kakao), budidaya kelapa genjah kopyor, irigasi tetes menghemat air, dan penggunaan sarana panen dan pascapanen yang modern</i>	Tata Ruang Pertanian, Pola Penanaman, dan Mekanisme Pertanian	Dana Keistimewaan	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	DPKP DIY					
2	Tata Ruang yang mengakomodasi kawasan budidaya pertanian melalui pembangunan sistem keamanan pangan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pemanfaatan website petani milenial	Tata Ruang Pertanian, Website Petani, dan Petani Milenial	Dana Keistimewaan	Pemanfaatan sistem web	DPKP DIY					
3	Tata Ruang yang mengakomodasi kawasan budidaya pertanian melalui pembangunan sistem keamanan pangan	Program Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas/Pengelolaan produksi tanaman sereal/ Tanaman pangan	<i>Pengembangan kawasan padi "Ir Nutri Zinc" untuk penanganan stunting</i>	Tata Ruang Pertanian, Tanaman Pangan Berkualitas, dan Penanganan Stunting	APBN	Kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi)	DPKP DIY					
4	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan	Sistem informasi dan Database TKD, Sultan Ground, PA Ground	Pertanahan, Sistem Informasi Terintegrasi, dan Database TKD, Sultan Ground, serta PA Ground	Dana Keistimewaan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	Satpol PP DIY					
5	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			Dana Keistimewaan	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Satpol PP DIY					
6	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa			Dana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Satpol PP DIY					
7	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan	Tata Kelola Pemanfaatan Data Spasial berbasis GIS untuk seluruh perangkat daerah	Sistem Informasi Tata Ruang, Pertanahan, Data Spasial, dan GIS	Dana Keistimewaan	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang terintegrasi dengan tata ruang	Dispertaru DIY					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
8	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			Dana Keistimewaan	Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan yang terintegrasi dengan tata ruang	Dispertaru DIY					
9	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan			Dana Keistimewaan	Jumlah dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dengan tata ruang	Dispertaru DIY					
10	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan			Dana Keistimewaan	<i>Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan</i>						
11	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya	Sistem Informasi Kebakaran dan Non-Kebakaran	Sistem Informasi Tata Ruang, Kejadian Kebakaran, dan Kejadian non-Kebakaran	Dana Keistimewaan	<i>Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY</i>	BPBD DIY					
12	Sistem informasi tata ruang terintegrasi											
13	Sistem informasi tata ruang terintegrasi		Pengenalan dan Pencegahan Bencana Berbasis Media Sosial	Tata Ruang, Bencana, dan Mitigasi Bencana	Dana Keistimewaan		BPBD DIY					
14	Sistem informasi tata ruang terintegrasi	Sub kegiatan pembangunan ketahanan sosial budaya	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kolaborasi dengan Desa Mandiri Budaya dari Dinas Kebudayaan (DESTANA dan KALTANA)	Tata Ruang, Bencana, dan Desa Mandiri Budaya	Dana Keistimewaan	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>	BPBD DIY					
15	Aplikasi penanganan RTLH yang terintegrasi dengan Kab/Kota	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi dengan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)	Tata Ruang Kawasan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Upaya Penanganan Kemiskinan	Dana Keistimewaan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	DPUPESDM DIY					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap						
								2024	2025	2026	2027	2028		
16	Aplikasi penanganan RTLH yang terintegrasi dengan Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	"INSAN PUPR BERKUMIS" Integrasi Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berkolaborasi untuk Mengurangi Kemiskinan di DIY"			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya								
17	Aplikasi penanganan RTLH yang terintegrasi dengan Kab/Kota	Program pengembangan perumahan				Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah								
18	Aplikasi penanganan RTLH yang terintegrasi dengan Kab/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Aplikasi NDALEM (Network Residence Information Qualified System)	Aplikasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Verifikasi Bantuan RTLH	APBD	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	DPUPESDM DIY							
19	Perlunya integrasi layanan portal satu data kesehatan	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkeg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Mobile Screening Penjaskes	Aplikasi Mobile, Pemantauan Kesehatan, dan Pemantauan Kesehatan Usia Produktif	APBD	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	DINKES DIY							
20	Pengembangan layanan hotline kesehatan	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkeg: Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Sangga Ratu (Sistem Antisipasi Kerawanan Dan Kegawatdaruratan Terpadu)/PSC 119	Hotline/Sistem Antisipasi, Kerawanan dan Kegawatdaruratan, Respon Cepat dan Penanganan Darurat	APBD	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DINKES DIY							
21	Pengembangan layanan hotline kesehatan	Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Subkeg: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Digitalisasi Kesehatan Tradisional (Jamu)	Informasi Kesehatan Tradisional, Pemasaran Digital Jamu dan E-commerce Jamu	Dana Keistimewaan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	DINKES DIY							

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
22	Pengelolaan manajemen transportasi (akses transportasi umum pindah moda, kewenangan pengelolaan transportasi, parkir).	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Penambahan Jalur Palbapang - Program Kartu Multi Trip, Tarif Pelajar Rp 60,-	Transportasi Umum, Tarif Spesial Pelajar, Sistem Pembayaran Elektronik, dan Ekspansi Layanan Transportasi	APBD	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DISHUB DIY					
23	Penyusunan kebijakan transportasi di tingkat Provinsi yang mampu mem-backup di Kab/Kota	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang	Program Becak dengan Tenaga Penggerak Alternatif	Transportasi Ramah Lingkungan dan Tenaga Penggerak Alternatif	Dana Keistimewaan	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	DISHUB DIY					
24	khususnya untuk mendukung Smart Living		Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Bus Listrik dan Prasarana Pendukungnya di Kawasan Strategis	Transportasi Ramah Lingkungan, Inovasi Transportasi (Bus), dan Manajemen Transportasi di Kawasan Strategis								

Tabel 4.2 Smart Governance

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyusunan dan optimalisasi Pergub DIY terkait Jogja Smart Province, SPBE, dan Satu Data kepada seluruh stakeholder dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kolaborasi dan integrasi antar platform layanan publik Pemerintah Kab/Kota se-DIY.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kebijakan Digitalisasi Kalurahan (Reformasi Kalurahan)	Regulasi, Digitalisasi Kalurahan, dan Reformasi Kalurahan	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam pelaksanaan/Implementasi Reformasi Kalurahan.	Biro Tapem					
2	Optimalisasi layanan publik berbasis digital	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Subkeg: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Whistle Blowing System Terintegrasi Tindak Pidana Korupsi	Platform Whistleblowing Terpadu, Layanan Publik, dan Pencegahan Korupsi	APBD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
3	Penyusunan dan optimalisasi Pergub DIY terkait Jogja Smart Province, SPBE, dan Satu Data kepada seluruh stakeholder dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kolaborasi dan integrasi antar platform layanan publik Pemerintah Kab/Kota se-DIY.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kebijakan Jogja Smart Province	Regulasi, Integrasi Platform Layanan, dan Jogja Smart Province	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Diskominfo					
4		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kebijakan SPBE dan Satu Data	Regulasi, SPBE, dan Satu Data	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Diskominfo					
5		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kebijakan Percepatan Integrasi Data Kab/Kota se-DIY	Regulasi, Integrasi Data Kab/Kota, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	APBD	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo					
6		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Reviu SOP/Prosedur terkait SPBE	Regulasi, SOP/Prosedur, dan SPBE	APBD	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Diskominfo					
7		Program Penataan Organisasi Subkeg: Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Evaluasi Peta Proses Bisnis Pemda DIY	Evaluasi, Penyederhanaan Proses Bisnis dan Penataan Organisasi	DANAIS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Biro Organisasi					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
8	SDM Digital	Program Kepegawaian Daerah Subkeg: Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Tim Digital Transformation Office (DTO)	SDM Digital dan Tim DTO	APBD	-	Diskominfo					
9	Penguatan pemahaman transformasi digital	Program Kepegawaian Daerah Subkeg: Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Peningkatan Literasi Digital	Pendidikan Digital, Keterampilan Pencarian Informasi, dan Inklusi Digital	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Badan Kepegawaian Daerah					
10	Penguatan Budaya Kerja	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Subkeg: Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Peningkatan Budaya Kolaborasi (sharing, collab project)	Perubahan mind set kolaborasi, pengembangan Budaya Pemerintahan dan Core Value ASN BerAKHLAK	DAIS	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Biro Organisasi					
11	Penguatan pemahaman transformasi digital	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Subkeg: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Integrated Management Training (LMS, KMS, Database Pelatihan)	SDM Digital, Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pegawai, dan pelatihan pegawai	APBD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bandiklat					
12	Efisiensi birokrasi layanan publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sinkronisasi Layanan dan Data serta peningkatan Kualitas Layanan Internal Pemerintahan Berbasis Elektronik	Integrasi Sistem, Interoperabilitas, dan Peningkatan Layanan Internal Pemerintah	APBD	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
13	Efisiensi birokrasi layanan publik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Subkeg: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Integrasi Data Penanganan Kemiskinan	Integrasi Data dan Upaya Penanganan Kemiskinan	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Ket: Sub Output: Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda					
14	Integrasi data dan layanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pengembangan Integrasi SPLP Provinsi hingga ke Kab/Kota	Integrasi Layanan dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	APBD	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo					
15		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Subkeg: Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Pemanfaatan Big Data Analytics	Big Data, Visualisasi dan Analisis Data	DANAIS	Jumlah Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Diskominfo					
16	Integrasi data dan layanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Subkeg: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Optimalisasi Integrasi Portal Data Kabupaten/Kota	Integrasi Portal, Pengelolaan Data Terpusat, dan Interoperabilitas Sistem	APBD	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo					
17		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Subkeg: Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Super App: Portal Layanan Pemerintahan Digital	Integrasi Layanan, One Stop Services, dan Layanan Publik	DANAIS	Jumlah Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Diskominfo					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap					
								2024	2025	2026	2027	2028	
18	Penyediaan layanan publik dalam satu genggaman (SSO)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Subkeg: Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Upgrade Super App Layanan Publik	Upgrade dan Pengembangan Super App	DANAIS	Jumlah Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Diskominfo						
19	Optimalisasi layanan publik berbasis digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Subkeg: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Sosialisasi Kanal Aduan Terintegrasi SP4N Lapor, e-Lapor yang terintegrasi	Kanal Aduan/SP4N Lapor, e-Lapor, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo						
20	Optimalisasi layanan publik berbasis digital	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Subkeg: Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Optimalisasi Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Provinsi dan Kab/Kota (Simpul kerjasama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi)	Jaringan/Simpul Inovasi Pelayanan Publik, Kerjasama Antarlembaga, dan Pengembangan Inovasi, jendela inovasi Pemda DIY berbasis portal	DANAIS	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Biro Organisasi						
21	Optimalisasi layanan publik berbasis digital	Program Penataan Organisasi Subkeg: Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Optimalisasi Survey Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat berbasis portal dan menampilkan hasil real time	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi						

Tabel 4.3 Smart Economy

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
1	Kemudahan layanan konsultasi bisnis	Layanan konsultasi bisnis online melalui Jogja Business Service Center (JBSC)	Jogja Business Service Centre	Integrasi pelayanan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM	APBD	Jumlah pelaku UMKM yang dilayani	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
2	Kemudahan Layanan Aduan Konsumen	Layanan aduan konsumen melalui Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SiKoncer)	SIKONCER	Penggunaan chat bot dan gps untuk layanan aduan	APBD	Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3	Mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru	Program dukungan pendampingan bagi start-up dan usaha kecil menengah	Integrasi sistem pemasaran produk lokal	Integrasi sistem pemasaran produk	APBD CSR	Jumlah wirausaha pemula (tahun n)	Dinas Koperasi dan UMKM					
4	Membangun ekosistem transaksi keuangan digital menuju masyarakat less cash	Peningkatan literasi digital di atas standar nasional	Peningkatan literasi digital di atas standar nasional	Peningkatan kapasitas SDM	APBD CSR	Indeks Literasi Digital	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
5	Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan Kewirausahaan Desa: Sibakul Jogja	Sibakul Jelajah Dunia	Peningkatan kapasitas SDM Peningkatan jumlah ekspor non migas Provinsi DIY	APBD Dana Istimewa	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama dari UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi ke manca negara	Dinas Koperasi dan UMKM					
6	Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis internet dalam mendukung aktivitas industri	Pengembangan industri kreatif dan informasi pariwisata	Informasi wisata yang terpadu dengan menggunakan barcode di titik keramaian	Teknologi informasi	APBD Dana Istimewa CSR	Jumlah titik barcode di kawasan wisata Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata					
7	Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis internet dalam mendukung aktivitas industri	Penguatan sistem transportasi umum terpadu terkait sumbu filosofi jogja untuk industri	Jogja Heritage Track Pengelolaan sistem transportasi oleh BUMD/BLUD	Teknologi Informasi Reformasi kelembagaan	APBD Dana Istimewa CSR	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dinas Perhubungan					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
8	Peningkatan Ketercukupan Bahan Baku	Sistem Informasi Bahan Baku (SiBaba)	Sistem Informasi Bahan Baku (SiBaba)	Teknologi Informasi Reformasi kelembagaan	APBD	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	Dinas Koperasi dan UMKM					
9	Membangun ekosistem transaksi keuangan digital menuju masyarakat less cash	Pengembangan Gateway Payment sendiri untuk semua transaksi digital di DIY bersama Bank BPD DIY	Gateway Payment	Teknologi Informasi	APBD	Elektrifikasi transaksi pemerintah Daerah	BPKA Provinsi DIY					
10	Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis internet dalam mendukung aktivitas industri	Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi	APBD Dana Istimewa CSR Project Development Facility dan Municipal Development Fund	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
11	Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis internet dalam mendukung aktivitas industri	Pengembangan Industri Wisata Medis Terintegrasi	Medical and Wellness Tourism yang terintegrasi dengan wisata dan nilai-nilai kebudayaan DIY	Integrasi antar kelembagaan Teknologi informasi	APBD Dana Istimewa CSR	Jumlah UMKM kesehatan lokal yang bekerja sama dengan rumah sakit dalam mengembangkan wisata medis (pihak)	Dinas Pariwisata					

Tabel 4.4 Smart Environment

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
1	<p>1. Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;</p> <p>3. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;</p> <p>4. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat;</p>	<p>Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</p> <p>Sub Kegiatan : Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</p>	<p>Jogja Hijau : Upaya pengelolaan lingkungan di tingkat Kalurahan dengan pendekatan 4 pilar (pengelolaan sampah, konservasi air, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan lahan terbuka)</p>	<p>Pengembangan kawasan hijau dalam hal pengelolaan sampah, konservasi air, energi terbarukan dan pengelolaan lahan terbuka dengan pemanfaatan teknologi informasi</p>	<p>APBD Dana Istimewa CSR</p>	<p>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</p>	<p>DLHK dan DLH Kabupaten/Kota, Paniradya, Pemerintah Kalurahan</p>					
2	<p>1. Peningkatan kolaborasi early warning system penanggulangan bencana;</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;</p> <p>3. Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan.</p>	<p>Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</p> <p>Subkeg: Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</p>	<p>Optimalisasi TPS3R dan penanganan limbah industri rumah tangga (BKK Pengelolaan Sampah)</p>	<p>Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Terintegrasi, Penanganan Limbah. dan TPS3R</p>	<p>APBD Dana Istimewa CSR</p>	<p>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</p>	<p>DLHK dan DLH Kabupaten/Kota, Paniradya, Pemerintah Kalurahan</p>					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
3	<p>1. Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;</p> <p>3. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;</p> <p>4. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat;</p>	<p>Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Subkeg: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut"</p>	<p>Sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime di sungai lintas Kabupaten/Kota dengan ONLIMO KLHK</p>	<p>Sistem Pemantauan Realtime, Kualitas Air, dan Kualitas Sungai</p>	<p>APBD Dana Istimewa CSR</p>	<p>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>	<p>DLHK dan DLH Kabupaten/Kota, Paniradya, Dinas Kebudayaan</p>					
4		<p>Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>	<p>Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (SPKUA) dengan alat Air Quality Monitoring System (AQMS) atau Sistem Pemantauan Kualitas Udara</p>	<p>Sistem pemantauan kualitas udara</p>	<p>APBD Dana Istimewa CSR</p>	<p>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>	<p>DLHK dan DLH Kabupaten/Kota</p>					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
5	1. Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air: Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Aplikasi Go Hydro (Aplikasi monitoring telemetri untuk pemantauan data hidrologi) yang bisa diakses semua masyarakat	Sistem Pengukuran dan pelaporan informasi seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air	APBD Dana Istimewa CSR	Jumlah dokumen pengelolaan sistem hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan provinsi	DPU ESDM					
	2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Help desk</i> pelayanan dokumen izin lingkungan dengan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	Sistem layanan perizinan untuk usaha terkait persetujuan lingkungan	APBD Dana Istimewa CSR	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	DLHK, DPMPSTP					
6	3. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;											
7	4. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat;											
	1. Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;	Program penyelenggaraan keistimewaan DIY : urusan kebudayaan	Geopark Jogja sebagai Geoprak Nasional (2025)	Pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keanekaragaman hayati dan budaya. Geopark Jogja merupakan kesatuan identitas yang mewakili warisan bumi, warisan alam, warisan budaya dan bentang alam yang berada di wilayah Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kota Yogyakarta	APBD Dana Istimewa	Tersedianya dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi Pengelolaan Geoheritage dan Geopark dalam Rangka Penyiapan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Biro PengembanganInfrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Sekretariat Daerah DIY					
	2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;											
	3. Meningkatkan kemitraan dalam rangka											

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap						
								2024	2025	2026	2027	2028		
	pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; 4. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat;													
8	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui optimalisasi teknologi ramah lingkungan; 2. Melakukan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon;	Pengelolaan energi terbarukan	Pembangunan PLTS Atap di gedung pemerintahan, Pemeliharaan berkala Energi Baru Terbarukan (EBT), dan Audit energi di gedung pemerintahan	Pemanfaatan energi terbarukan (PLTS) di kantor pemerintahan yang dipasang di atap gedung.	APBD Dana Istimewa CSR	Capaian pemanfaatan energi baru terbarukan Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	DPUP ESDM							
9	1. Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang; 3. Meningkatkan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Mitigasi Bencana Masyarakat Pesisir Melalui Konservasi dan Restorasi Mangrove Secara Berkala	Melindungi ekosistem pesisir dan laut dengan membentuk kawasan konservasi guna melindungi spesies dan habitat di dalamnya.	APBD Dana Istimewa CSR	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap						
								2024	2025	2026	2027	2028		
	kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; 4. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat;													
10	1. Peningkatan kolaborasi early warning system penanggulangan bencana; 2. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Optimalisasi Peran Kelompok Penggiat Konservasi yang Terdaftar dan Aktif dalam Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Melindungi ekosistem pesisir dan laut dengan pelibatan masyarakat pegiat konservasi yang terdata.	APBD Dana Istimewa CSR	Jumlah Kelompok Penggiat Konservasi yang Terdaftar dan Aktif	Dinas Kelautan dan Perikanan							
11	3. Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan DIY Urusan Tata Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul/Bantul/Kulon Progo	Implementasi Blue Economy Melalui Pemberdayaan Ekonomi Maritim Berorientasi Pelestarian Lingkungan	Pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut guna mengimplementasikan ekonomi biru.	APBD Dana Istimewa CSR	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Dokumen Aturan/Kebijakan tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di DIY, yang mencakup 1) Tata Kelola dan Aturan Teknis Perikanan Tangkap 2) Tata Kelola dan	Dinas Kelautan dan Perikanan							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
						Pembudidayaan Ikan dan Perlindungannya, Termasuk Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan						

Tabel 4.5 Smart Society

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
1	Penanganan masalah sosial berbasis penguatan keluarga dan restorasi sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	aplikasi SIKRESNO (Sistem Kendali Registrasi Organisasi Masyarakat dan Politik)	Sistem pengendalian ormas	APBD	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Badan Kesbangpol DIY					
2	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kampung Berkah	Kampung Berkah menyebar ke tiap Kab/Kota di DIY dengan ciri khas masing-masing	APBD	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Bina Mental DIY					
3	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Aplikasi e-Makarti	Aplikasi ini direalisasikan lagi sesuai kebutuhan dan realtime	Dana Istimewa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
4	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Platform Mobile Training Unit	Dilakukan sinkronisasi dengan Dinsos terkait penerima training	APBD	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY					
5	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Model Global Gotong Royong Tetrapreneur (G2RT)	Hilirisasi wirausaha masyarakat sampai pemasaran	Dana Istimewa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat					
6	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jaminan Sosial Lanjut Usia Untuk Kemiskinan Ekstrem	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	Dana Istimewa	Jumlah individu yang tergabung dalam kelompok dan mendapatkan bantuan modal usaha bersama	Dinas Sosial DIY					
7	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasikan kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengembangan Aplikasi Sidak Tradisi Sebagai Platform Matching Student antara siswa lulusan SMA/SMK dan Perusahaan	sinkronisasi data lulusan SMK dengan sistem pencari kerja	APBD	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	DIKPORA DIY					
8	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasikan kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	MomenKu Siap Berkemas (Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Partisipasi Berantas Kemiskinan Masyarakat)	bantuan modal untuk warga miskin	Dana Istimewa	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	DIKPORA DIY					
9	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasikan kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Aplikasi sibukin (Sistem pencatatan Peserta Pelatihan)	basis data untuk pencatatan peserta pelatihan	Dana Istimewa	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
10	Penanganan masalah sosial berbasis penguatan keluarga dan restorasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Assesment Center (Layanan Asesmen Terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	basis data untuk masyarakat penerima bantuan	APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar penderita HIV/AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial DIY					
11	Penanganan masalah sosial berbasis penguatan keluarga dan restorasi sosial	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Gerakan Restorasi Sosial Berbudaya Jawa RAJIN (ngapuRancang, Jempol, ImmaN)	Restorasi Sosial yang dikeman dengan teknologi dan diintegrasikan dengan media pendidikan	Dana Istimewa	Jumlah lokasi pelaksanaan	Dinas Sosial DIY					
12	Penanganan masalah sosial berbasis penguatan keluarga dan restorasi sosial	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Super App Digitalisasi Layanan Keluarga (konseling, penanganan kekerasan, pengasuhan dan tumbuh kembang anak, pernikahan)	Integrasi layanan call center (Sapa 129), Telekonseling (Tesaga), Konseling Tatap Muka (PUSPAGA PRIMA), layanan kasus (UPT BPPA, dan P2TPAKK, RDU), Layanan Rehabilitasi Kesehatan pembiayaan (BP Jamkesos) dan layanan lainnya yang tergabung dalam FPKK)	APBD	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang di layani dengan baik	DP3AP2 DIY					
13	Penanganan masalah sosial berbasis penguatan keluarga dan restorasi sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Wayang Cakruk	program restorasi sosial untuk nguri-uri kabudayan	APBD	Jumlah titik lokasi pelaksanaan	Dinas Sosial DIY					
14	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KUBE (Penumbuhan), Pengembangan, PKH Graduasi	pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bidang	APBD	Jumlah individu yang tergabung dalam kelompok dan mendapatkan bantuan modal usaha bersama	Dinas Sosial DIY					
15	Peningkatan daya saing dan ketangguhan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis keunggulan SDM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pelaksanaan Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja	basis data digital untuk data kemiskinan	APBD	Jumlah individu yang tergabung dalam kelompok dan mendapatkan bantuan modal usaha bersama	Dinas Sosial DIY					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap						
								2024	2025	2026	2027	2028		
			(MANUNGGAL RAHARJA)											
16	Penanganan masalah sosial berbasis penguatan keluarga dan restorasi sosial	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	DESA PRIMA (program perempuan indonesia maju mandiri)	Digitalisasi Layanan KEP Prima : Profil, Produk, Pemasaran, Akuntansi,	APBD	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	DP3AP2 DIY							
17	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasi kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	i-Jogja	integrasi perpustakaan digital jogja	APBD	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	DPAD DIY							
18	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasi kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan berbasis inklusi sosial	perpustakaan yang ramah terhadap disabilitas	APBD	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	DPAD DIY							
19	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasi kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa)	integrasi perpustakaan di seluruh DIY	APBD	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	DPAD DIY							
20	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasi kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemerataan Konten Belajar Berkualitas dengan Platform Jogja Belajar	Menambah konten belajar di Platform Jogja Belajar terkait dengan kesehatan mental, restorasi sosial, etika dan sopan santun	APBD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DIKPORA DIY							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
21	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasikan kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Gerakan Literasi untuk Masyarakat	peningkatan literasi data untuk masyarakat	APBD	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	DPAD DIY					
22	Melakukan sinergi pentahelix yang mengkolaborasikan kampus, kampung, komunitas, korporate dan pemerintah untuk penguatan literasi data dan digital	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Kantong Kemiskinan	pelatihan wirausaha didaerah miskin	APBD	Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	DIKPORA DIY					
23	Pengelolaan kebijakan dan media tanggap bencana serta perlindungan kekerasan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Platform Manusia Jogja Tangguh Bencana	(Integrasi TAGANA, DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana), SATRIYO, LANSIGANA, Tagana Masuk Sekolah, Tagana Masuk Komunitas)	APBD	Jumlah orang yang dikerahkan dalam upaya pengurangan resiko bencana	Dinas Sosial DIY					

Tabel 4.6 Smart Branding

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
1	Pemanfaatan perkembangan IT dengan digitalisasi	Program Pemasaran Pariwisata Keg: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Publikasi seni dan kebudayaan daerah melalui campaign Visiting Jogja	Destinasi Wisata Budaya, Campaign "Visiting Jogja", dan Kolaborasi Seni dan Pariwisata	APBD	Jumlah Followers dan Subscribers Media Sosial Dinas Pariwisata DIY dan VisitingJogja (orang) Jumlah Dokumen Kemitraan Promosi Pariwisata (dokumen) Jumlah Transaksi B2B (unit)	Dinas Pariwisata					

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
2	Pemanfaatan perkembangan IT dengan digitalisasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Keg: Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi dan Kolaboratif untuk Pemasaran	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi dan Kolaboratif untuk Pemasaran	Portal Layanan Publik, Pemasaran Digital, dan Promosi Pariwisata	APBD	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Pariwisata					
3	Optimalisasi kawasan budaya dan pariwisata provinsi sebagai warisan budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Subkeg: Pengembangan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pengelolaan desa wisata sebagai DTWP	Pengelolaan Destinasi Wisata Pariwisata Terpadu (DTWP), Diversifikasi Pengalaman Wisatawan, dan Pengembangan Pariwisata	Dana Keistimewaan	Jumlah Desa/Kampung Wisata yang Naik Kelas dari Klasifikasi Berkembang ke Maju dan dari Klasifikasi Maju ke Mandiri (lokasi)	Dinas Pariwisata					
4	Pemanfaatan perkembangan IT dengan digitalisasi	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Subkeg: Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Fasilitasi media digital berbasis komunitas seni dan kebudayaan daerah	Media Digital, Komunitas Seni dan Budaya, dan Promosi Pariwisata	APBD	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (persen)	Dinas Kominfo					
5	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Subkeg: Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan kegiatan/event kearifan seni dan kebudayaan daerah kabupaten/kota	Festival Seni dan Kebudayaan, Pameran, dan Pertunjukan Budaya Tradisional	Dana Keistimewaan	Jumlah Pengunjung Event/Atraksi Wisata dan Budaya Unggulan DIY dan Difasilitasi oleh Pemda DIY (orang)	Dinas Pariwisata					
6	potensi lokal dan solidaritas sosial	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Subkeg: Publikasi Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pengembangan kegiatan/event kearifan seni dan kebudayaan daerah kabupaten/kota	Festival Seni dan Kebudayaan, Pameran, dan Pertunjukan Budaya Tradisional	APBD	Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol					
7	Penguatan iklim investasi berbasis keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Subkeg: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengembangan iklim ekonomi kreatif yang didukung oleh investasi	Ekonomi kreatif, Investasi, dan Promosi Potensi Wilayah	APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal (dokumen)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
8	(pariwisata, ekonomi kreatif dan pendidikan)	Program Pengembangan Ekspor Subkeg: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1	Pengembangan kegiatan/event kearifan seni dan kebudayaan daerah kabupaten/kota berbasis perdagangan	Ekonomi kreatif, Investasi, dan Promosi Potensi Wilayah	APBD	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina (orang)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap						
								2024	2025	2026	2027	2028		
		(satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi												
9	Pemanfaatan perkembangan IT dengan digitalisasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Subkeg: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Pelatihan Komunikasi Publik, Pengembangan Kapasitas Individu, dan Penguatan Kompetensi Media Sosial	APBD	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Dinas Kominfo							
10	Optimalisasi kawasan budaya dan pariwisata provinsi sebagai warisan budaya	Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengelolaan sarana kebudayaan lokal sebagai aset pariwisata regional	Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Aset Pariwisata, dan Pengelolaan Sarana Kebudayaan	Dana Keistimewaan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Budaya dan Lembaga Budaya (unit)	Dinas Kebudayaan							
11		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengelolaan sarana kebudayaan lokal sebagai aset pariwisata regional	Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Aset Pariwisata, dan Pengelolaan Sarana Kebudayaan	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi (dokumen)	Dinas Pariwisata							
12		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- Keterlibatan/kolaborasi dengan pelaku budaya dan diintegrasikan dengan digital - Memperkuat ciri khas destinasi pariwisata masing-masing wilayah	Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Promosi Pariwisata dan Digital Collaboration Platforms	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (unit)	Dinas Pariwisata							
13	Pemanfaatan perkembangan IT dengan digitalisasi	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan fasilitasi sumber daya manusia seni dan kebudayaan daerah kabupaten/kota	Program Pembinaan Seniman, Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan, dan Peningkatan Kapasitas Budayawan	Dana Keistimewaan	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga	Dinas Kebudayaan							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Elemen Kunci Perubahan	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan	Roadmap				
								2024	2025	2026	2027	2028
14	Penguatan iklim investasi berbasis keistimewaan (pariwisata, ekonomi kreatif dan pendidikan)	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Pengembangan iklim ekonomi kreatif melalui pariwisata	Pengembangan pariwisata, Investasi Berbasis Keistimewaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif	APBD	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang Difasilitasi (orang)	Dinas Pariwisata					
15		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan iklim ekonomi kreatif melalui pariwisata	Pengembangan pariwisata, Investasi Berbasis Keistimewaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif	APBD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI	Dinas Pariwisata					
16	Penguatan ekosistem regulasi dalam peningkatan kearifan dan kebudayaan lokal	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Integrasi kebijakan penyelenggaraan agenda pengembangan urusan keistimewaan ranah kebudayaan	Regulasi, Pengembangan Kearifan dan Kebudayaan lokal	APBD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi (persen)	Paniradya Kaistimewan					

B. Program Kerjasama *Smart Province* Lintas Daerah

Program kerja sama *Smart Province* Lintas Daerah merupakan program kolaborasi yang melibatkan beberapa daerah yang dirumuskan oleh Tim Pelaksana *Smart Province* DIY dan Pokja *Smart Province* DIY. Program kerja sama *Smart Province* Lintas daerah dianalisis berdasarkan masing-masing dimensi. Lebih jauh, dalam program kerja sama lintas daerah diperlukan kesepakatan dalam analisis kebutuhan pembiayaan, pemerintah daerah yang terlibat kerja sama, serta OPD yang menjadi *leading sector* pada setiap inovasi.

Tabel 4.7 Program Kerja Sama Dimensi *Smart Governance*

No	Nama Joint-Program/ Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
1	Peningkatan Budaya Kolaborasi (sharing, collab project)	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Biro Organisasi
2	Integrated Management Training (LMS, KMS, Database Pelatihan)	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	BKD
3	Sinkronisasi Layanan dan Data serta peningkatan Kualitas Layanan Internal Pemerintahan Berbasis Elektronik	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Biro Organisasi
4	Integrasi Data Penanganan Kemiskinan	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Bappeda
5	Pengembangan Integrasi SPLP Provinsi hingga ke Kab/Kota	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Diskominfo
6	Pemanfaatan Big Data Analytics	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul,	Diskominfo

No	Nama Joint-Program/ Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
				Kulonprogo, Gunung Kidul, Pemkot Yogyakarta	
7	Optimalisasi Integrasi Portal Data Kabupaten/Kota	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Diskominfo
8	Platform Digitalisasi Kalurahan (Reformasi Kalurahan)	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Diskominfo

Tabel 4.8 Program Kerja Sama Dimensi *Smart Branding*

No	Nama Joint-Program/ Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
1	Program Pengelolaan Aset Pariwisata Kebudayaan Daerah	2024-2028	Dana Keistimewaan	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan
2	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Keistimewaan	2024-2028	APBD Provinsi dan Dana Keistimewaan	Seluruh Kabupaten/Kota	Paniradya Keistimewaan, Dinas Kominfo
3	Pengembangan Iklim Investasi dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata	2024-2028	APBD Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
4	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi dan Kolaboratif untuk Pemasaran	2024-2028	APBD Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Dinas PUPESDM

No	Nama Joint-Program/ Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
5	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	2024- 2028	Dana Keistimewaan	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan
6	Pengembangan Kegiatan Kearifan Lokal Daerah Kabupaten/Kota	2024- 2028	Dana Keistimewaan	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
7	Fasilitasi Komunitas dengan Media Digital	2024- 2028	APBD Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
8	Program Pengelolaan Infrastruktur dalam Rangka Beautifikasi Kota di DIY (Si Sufi)	2024- 2028	Dana Keistimewaan	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan

Tabel 4.9 Program Kerjasama Smart Economy Lintas Daerah DIY

No	Nama Joint-Program /Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
1	Pengembangan industri kreatif dan informasi pariwisata	2024 - 2028	APBD Provinsi DIY Dana Keistimewaan DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	Dinas Pariwisata DIY
2	Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri	2024- 2028	APBD Provinsi DIY Dana Alokasi Khusus CSR KPBK (PDF, AP/VGF)	Pemda DIY, Pemkab (Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
3	Penguatan sistem transportasi umum terpadu terkait dengan sumbu filosofi Jogja	2024 - 2028	APBD Provinsi DIY Dana Keistimewaan DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul), Pemkot Yogya	Dinas Perhubungan DIY

No	Nama Joint-Program /Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
			KPBU (PDF)		
4	Pengembangan Industri Wisata Medis Terintegrasi	2024 - 2028	APBD Provinsi DIY Dana Keistimewaan DIY CSR	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Pariwisata DIY
5	Layanan Konsultasi bisnis online melalui Jogja Business Service Center (JBSC)	2024-2028	APBD Provinsi DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
6	Sibakul Jelajah Dunia	2024 - 2028	APBD Provinsi DIY Dana Keistimewaan DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Koperasi dan UKM DIY
7	Layanan aduan konsumen melalui Sistem Informasi Konsumen Cerdas (Sikoncer)	2024-2028	APBD Provinsi DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
8	Penyediaan sistem informasi pemasaran produk dalam negeri khususnya produk DIY	2024-2028	APBD Provinsi DIY Dana Keistimewaan DIY CSR	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
9	Program dukungan, pendampingan bagi startup dan usaha kecil menengah	2024-2028	APBD Provinsi DIY CSR	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Koperasi dan UKM DIY
10	Sistem informasi bahan baku (SiBaba)	2024 - 2028	APBD Provinsi DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung	Dinas Perindustrian dan

No	Nama Joint-Program /Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
				Kidul), Pemkot Yogya	Perdagangan DIY
11	Peningkatan literasi digital di atas standar nasional	2024	APBD Provinsi DIY CSR	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Diskominfo DIY
12	Pengembangan Gateway Payment sendiri untuk semua transaksi digital di DIY bersama Bank BPD DIY	2024 - 2028	APBD Provinsi DIY	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Tabel 4.10 Program Kerja Sama Dimensi *Smart Living*

Nama Joint-Program/ Joint-Inovasi	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
GERPEMI (Gerakan pemanfaatan lahan sekitar rumah untuk peningkatan ekonomi dan warung rakyat, serta pemanfaatan sampah)	2024-2028	APBD, Hibah, dan Dana Keistimewaan	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DPUPESDM DIY
SEMAKIN PINTAR (Sistem Monitoring Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Data, dan Program Keterampilan)	2024-2028	APBD, CSR, dan Dana Keistimewaan	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Bappeda DIY
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kolaborasi dengan Desa Mandiri Budaya dari Dinas Kebudayaan	2024-2028	APBD, CSR, dan Dana Keistimewaan	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	BPBD DIY

Nama <i>Joint-Program/ Joint-Inovasi</i>	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
Penambahan Rute Trans Jogja (Palbapang - Malioboro)	2024	APBD	Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkot Yogya	DISHUB DIY
GERSAMPOL (Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah dari Rumah dan Aplikasi Penjualan Online)	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DLH DIY
MATA HATIKU (Bersama Kita Cegah Stunting)	2024-2028 dan jangka panjang Tahun 2033	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DINKES DIY
MATAHATI (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa)	2024-2028	APBD, Hibah, dan Dana Keistimewaan	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DINKES Sleman dan Kota Yogyakarta
SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)	2024-2028	APBD dan Dana Keistimewaan	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Disperparu DIY
Mundur Munggah Madep Kali (M3K)	2024-2028	DAK, APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul), Pemkot Yogya	Bappeda DIY
<i>CAR PRIORITY</i>	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	Dishub DIY, Dishub Kota Yogyakarta. Dishub Sleman
MEWARTA JIWA “Merajut Warga Tangguh Sehat Jiwa”	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogyakarta	DINKES DIY

Tabel 4.11 Program Kerja Sama Dimensi *Smart Society*

Nama <i>Joint-Program/ Joint-Inovasi</i>	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
Pemberian Bantuan berbasis Integrasi Data	2024-2028	APBD, KPBU, CSR, HIBAH	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul), Pemkot Yogya	DINSOS DIY
Platform Digitalisasi Penguatan Konseling Keluarga	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DP3AP2 DIY
Platform Mobile Training Unit Berbasis Profiling	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Kulonprogo), Pemkot Yogya	DISNAKERTRANS DIY
Sinkronisasi Respon Cepat Tawaran Lowongan Kerja berbasis Media Sosial	2024-2028	APBD	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DISNAKERTRANS DIY
Penguatan Kewirausahaan Masyarakat Secara Terpadu dan Berkelanjutan untuk Penanggulangan Kemiskinan	2024-2028	APBD, DANAIS, CSR, HIBAH, KPBU	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DIKPORA DIY, DINSOS DIY, DP3AP2 DIY, Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
Gerakan Literasi Kontemporer	2024-2028	APBD, CSR	Pemda DIY, Pemkab (Bantul), Pemkot Yogya	DIKPORA DIY, DPAD DIY

Nama <i>Joint-Program/ Joint-Inovasi</i>	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
Pemerataan Konten Belajar Berkualitas	2024-2028	APBD, DANAIS, CSR, HIBAH	Pemda DIY, Pemkab (Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DIKPORA DIY
Perluasan Jogja Library for All	2024-2028	APBD, CSR, HIBAH	Pemda DIY, Pemkab (Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DPAD DIY
Platform Manusia Jogja Tangguh Bencana	2024-2028	APBD, CSR, HIBAH	Pemda DIY, Pemkab (Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DINSOS DIY
Platform Integrasi Aduan Publik dari Masyarakat oleh masyarakat (crowdsourcing)	2024-2028	APBD, CSR, HIBAH	Pemda DIY, Pemkab (Bantul)	BAPPEDA DIY

Tabel 4.12 Program Kerja Sama Dimensi *Smart Environment*

Nama <i>Joint-Program/ Joint-Inovasi</i>	Tahun	Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama	OPD Leading Sector
Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Terintegrasi (Kolaborasi Pemda DIY, Pemkab dan Pemkot)	2024-2028	Danais, DAK, Bank Dunia, Dana Desa, CSR	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DLHK DIY
Jogja Hijau	2024-2028	Danais, DAK, Bank Dunia, Dana Desa, CSR	Pemda DIY, Pemkab (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul), Pemkot Yogya	DLHK DIY

BAB V

KERANGKA PENDANAAN

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi *Smart Province* adalah pendanaan. Tiap inovasi yang diusulkan dalam Rencana Induk Jogja *Smart Province* yang akan dijalankan dalam bentuk program, kegiatan, ataupun sub kegiatan, perlu disertai perencanaan pendanaan yang jelas agar kepastian keterlaksanaannya dapat dijamin. Dalam domain *Smart Province*, aspek pendanaan menjadi lebih kompleks karena ada unsur pemerintah kabupaten/kota yang memiliki otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan anggaran bagi program dan kegiatan pembangunannya. Kompleksitas muncul ketika dalam *Smart Province* dibahas juga kolaborasi program antar kabupaten/kota. Agar kolaborasi program dapat berjalan dengan lancar, maka pendanaannya pun perlu dikolaborasikan. Sinkronisasi dalam hal waktu (tahun mulai, durasi) maupun besaran anggaran perlu dilakukan agar tiap program yang berkolaborasi dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Persoalan pendanaan yang berbeda terjadi pada level pemerintah provinsi. Persoalannya sebenarnya klasik: anggaran Pemda DIY tidak cukup untuk membiayai seluruh usulan inovasi yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk Jogja *Smart Province*. Dengan kondisi ini, Pemda DIY dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pendanaan alternatif di luar APBD dan Danais. Sumber-sumber dana alternatif pada umumnya dimiliki oleh otoritas/lembaga lain, sehingga untuk mengaksesnya perlu skema-skema kerjasama yang bersifat saling menguntungkan.

Bab V ini menjelaskan tentang kerangka pendanaan yang dapat dikaji dan dieksplorasi lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan biaya bagi implementasi inovasi-inovasi Jogja *Smart Province*. Subbab 5.1 menjelaskan tentang profil kebutuhan pendanaan Jogja *Smart Province* secara umum, sementara subbab 5.2 menguraikan beberapa sumber dan mekanisme pendanaan yang bisa diakses, utamanya sumber-sumber yang berada di luar lingkup Pemerintah DIY.

5.1 Indikasi Kebutuhan Anggaran Program

Analisis kebutuhan anggaran merupakan salah satu cara untuk menentukan kebutuhan anggaran sesuai kondisi yang diinginkan atau diharapkan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang ditentukan, sehingga

skala kebutuhan akan terlihat jelas. Anggaran sebagai sebuah rencana tindakan, dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan instansi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam pembangunan *Smart Province* perlu melakukan penahapan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penyusunan indikasi kebutuhan anggaran program, dimaksudkan untuk penyusunan kebutuhan anggaran program inovasi dan *quick win* yang akan dijalankan dalam Rencana Induk *Smart Province*. Identifikasi kebutuhan anggaran dilakukan melalui identifikasi dimensi dan sub dimensi *Smart Province*, yang kemudian diintegrasikan dengan Visi RPJMN dan strategi yang kemudian nanti dijabarkan dalam program dan kebutuhan anggaran rencana aksi sehingga terlihat kebutuhan anggaran untuk melaksanakan inovasi dan *quickwin* untuk masing-masing dimensi dan sub dimensi *Smart Province*.

Untuk penentuan indikasi anggaran, diambil dari Renstra masing-masing OPD Provinsi yang sesuai dengan inovasi per dimensi. begitu pula dengan indikasi anggaran dari Kabupaten/kota. Di dalam indikasi anggaran pemerintah kabupaten/kota banyak yang belum terisikan anggarannya, hal ini disebabkan oleh timeline penyusunan Rencana Induk *smart city* yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota dan provinsi. Mayoritas timeline *rencana induk* kabupaten/kota selesai sebelum tahun anggaran 2023/2024 sedangkan penyusunan Rencana Induk *smart province* baru disusun pada tahun anggaran 2023/2024. Berikut merupakan indikasi anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan Jogja *Smart Province*.

Tabel 5.1 Indikasi Anggaran yang dibutuhkan dalam Pembangunan Jogja *Smart Province*

Dimensi	Sub Dimensi	Anggaran (dalam Rupiah)			
		2024	2025	2026	2027
Smart Governance	Perancangan Kebijakan	7,110,000,000.00	4,432,000,000.00	2,475,200,000.00	1,522,720,000.00
	Birokrasi	-	11,153,694,000.00	5,029,597,000.00	4,369,422,000.00
	Layanan Publik	22,689,620,000.00	23,750,494,000.00	4,475,080,000.00	4,398,422,000.00
Total Indikasi Anggaran <i>Smart Governance</i>		29,799,620,000.00	39,336,188,000.00	11,979,877,000.00	10,290,564,100.00

Dimensi	Sub Dimensi	Anggaran (dalam Rupiah)			
		2024	2025	2026	2027
	<i>Indikasi Anggaran Smart Governance Kota Yogyakarta</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Governance Kab Sleman</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Governance Kab Bantul</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Governance Kab Kulon Progo</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Governance Kab Gunung Kidul</i>	16,244,565,750.00	NA	NA	NA
Smart Branding	Pariwisata	9,130,000,000.00	10,076,000,000.00	11,071,000,000.00	12,041,000,000.00
	Daya Saing Bisnis	2,894,753,800.00	9,930,357,090.00	10,573,392,799.00	10,900,000,000.00
	Wajah (Tampilan) Kota	35,270,489,200.00	41,298,096,490.00	43,283,568,199.00	44,728,675,400.00
	Promosi Budaya	19,506,719,600.00	19,721,428,360.00	17,070,178,397.00	17,400,000,000.00
	Total Indikasi Anggaran Smart Branding	66,801,962,600.00	81,025,881,940.00	81,998,139,395.00	85,069,675,400.00
	<i>Indikasi Anggaran Smart Branding Kota Yogyakarta</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Branding Kab Sleman</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Branding Kab Bantul</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Branding Kab Kulon Progo</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Branding Kab</i>	26,791,130,059.00	NA	NA	NA

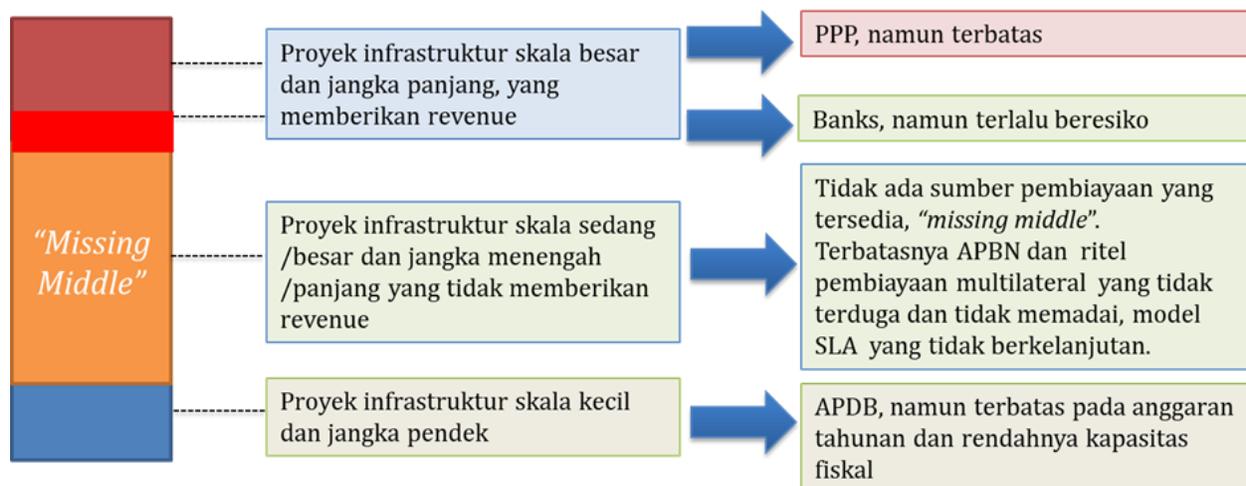
Dimensi	Sub Dimensi	Anggaran (dalam Rupiah)			
		2024	2025	2026	2027
<i>Gunung Kidul</i>					
Smart Economy	Ekosistem Industri	3,713,963,955.00	247,765,876.00	132,171,443.00	119,650,000.00
	Kesejahteraan Masyarakat	4,490,000,000.00	4,342,768,045.00	4,603,051,085.00	4,250,000,000.00
	Ekosistem Transaksi Keuangan	1,319,983,690.00	1,379,730,475.00	1,430,711,485.00	367,000,000.00
	Total Indikasi Anggaran Smart Economy	9,523,947,645.00	5,970,264,396.00	6,165,934,013.00	4,736,650,000.00
<i>Indikasi Anggaran Smart Economy Kota Yogyakarta</i>		NA	NA	NA	NA
<i>Indikasi Anggaran Smart Economy Kab Sleman</i>		NA	NA	NA	NA
<i>Indikasi Anggaran Smart Economy Kab Bantul</i>		NA	NA	NA	NA
<i>Indikasi Anggaran Smart Economy Kab Kulon Progo</i>		NA	NA	NA	NA
<i>Indikasi Anggaran Smart Economy Kab Gunung Kidul</i>		3,724,288,300.00	NA	NA	NA
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	50,866,000,000.00	259,420,914,812.00	265,226,369,255.00	263,203,559,533.00
	Kesehatan	1,473,280,000.00	1,554,502,000.00	1,663,846,000.00	1,911,724,000.00
	Transportasi	168,319,903,984.00	196,158,612,812.00	199,007,723,255.00	190,407,055,533.00
Indikasi Anggaran Smart Living		220,659,183,984.00	457,134,029,624.00	465,897,938,510.00	455,522,339,066.00
<i>Indikasi Anggaran Smart Living Kota Yogyakarta</i>		NA	NA	NA	NA

Dimensi	Sub Dimensi	Anggaran (dalam Rupiah)			
		2024	2025	2026	2027
	<i>Indikasi Anggaran Smart Living Kab Sleman</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Living Kab Bantul</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Living Kab Kulon Progo</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Living Kab Gunung Kidul</i>	287,981,765,511.00	NA	NA	NA
Smart Society	Interaksi Masyarakat	8,088,694,500.00	5,692,293,950.00	5,949,253,545.00	6,231,908,680.00
	Ekosistem Pendidikan	348,643,200.00	2,277,002,650.00	3,076,004,795.00	3,561,260,043.00
	Keamanan Masyarakat	17,743,709,400.00	19,816,880,340.00	21,948,728,374.00	2,701,600,000.00
	<i>Indikasi Anggaran Smart Society</i>	26,181,047,100.00	27,786,176,940.00	30,973,986,714.00	12,494,768,723.00
	<i>Indikasi Anggaran Smart Society Kota Yogyakarta</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Society Kab Sleman</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Society Kab Bantul</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Society Kab Kulon Progo</i>	NA	NA	NA	NA
	<i>Indikasi Anggaran Smart Society Kab Gunung Kidul</i>	40,420,738,258.00	NA	NA	NA
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	NA	NA	NA	NA
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	46,550,500.00	NA	NA	NA

Dimensi	Sub Dimensi	Anggaran (dalam Rupiah)			
		2024	2025	2026	2027
	Tata Kelola	NA	NA	NA	NA
Indikasi Anggaran	Smart Environment	46,550,500.00	NA	NA	NA
Indikasi Anggaran	Smart Environment Kota Yogyakarta	NA	NA	NA	NA
Indikasi Anggaran	Smart Environment Kab Sleman	NA	NA	NA	NA
Indikasi Anggaran	Smart Environment Kab Bantul	NA	NA	NA	NA
Indikasi Anggaran	Smart Environment Kab Kulon Progo	NA	NA	NA	NA
Indikasi Anggaran	Smart Environment Kab Gunung Kidul	9,716,500,000.00	NA	NA	NA
TOTAL INDIKASI ANGGARAN JOGJA SMART PROVINCE		353,012,311,829.00	611,252,540,900.00	597,015,875,632.00	568,113,997,289.00

5.2 Indikasi Sumber Dana (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Dalam pembangunan perkotaan, terutama *smart city* di Indonesia terdapat beberapa isu strategis terkait pendanaan dan pembiayaan yang menjadi perhatian, antara lain: isu kelembagaan yang terkadang belum tertuang dalam dokumen perencanaan, kondisi pembiayaan infrastruktur di Indonesia berada pada pasar tidak sempurna, pembiayaan infrastruktur perkotaan yang terbatas dari pinjaman pemerintah dan skema PPP, rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen proyek yang *feasible - good and bankable*, ketergantungan yang tinggi terhadap APBN dalam pembangunan infrastruktur, serta terdapat kesenjangan yang besar, terutama dari pembiayaan untuk proyek *non-generate revenue*.



Gambar 5.1. Skema Pendanaan Pembangunan Perkotaan di Indonesia

Secara umum ada 2 jenis skema pendanaan yang bisa digunakan untuk membiayai inovasi-inovasi Jogja *Smart Province*: *funding* dan *financing* (sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk menghindari kerancuan pemaknaan). Skema *funding* biasanya dilakukan oleh pemerintah, sementara skema *financing* oleh institusi finansial (bank, investor, dan lain-lain). Perbedaan utama antara keduanya adalah *funding* tidak mengharapkan pengembalian dana, sementara *financing* menganggap dana yang diberikan adalah hutang, sehingga perlu dikembalikan.

Bagi pemerintah, skema *funding* jauh lebih mudah diakses karena sumber dananya berasal dari pemerintah sendiri (APBD dan sumber pendanaan pemerintah lainnya), namun ketersediaannya terbatas. Skema *financing* menawarkan jangkauan pendanaan yang lebih besar, namun aksesnya lebih sulit karena ada persyaratan-persyaratan tertentu terkait dengan pengembalian dana yang biasanya sulit dipenuhi oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, biasanya skema *financing* hanya digunakan untuk proyek-proyek khusus yang skalanya besar, dan memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan pendanaan tersebut. Untuk mendanai inovasi-inovasi dalam konteks smart province yang pada umumnya berskala kecil dan berorientasi pada layanan publik (sehingga tidak bisa menghasilkan pendapatan bagi pemerintah), skema *financing* kurang cocok. Apalagi perlakuan pendanaan yang dianggap sebagai hutang memunculkan risiko yang tidak ringan bagi pemerintah.

Dengan mengeluarkan opsi *financing* dari sumber pendanaan, maka tinggal tersisa opsi *funding*. Dengan terbatasnya dana dari sumber pemerintah, maka diperlukan strategi tertentu agar semua inovasi dapat didanai dengan baik. Secara umum ada 2 prinsip utama yang dapat

digunakan untuk menentukan pendanaan bagi inovasi-inovasi *Smart Province* DIY:

1. Sumber dana pemerintah (APBD, Danais, dan sumber-sumber pemerintah lainnya) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan inovatif yang berkontribusi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat. Program dan kegiatan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedaruratan mendapatkan prioritas pembiayaan dari dana pemerintah.
2. Untuk program dan kegiatan inovatif lainnya dapat diupayakan sumber-sumber dana lain dengan skema *funding* yang tidak mengikat dan memberikan risiko yang minimal.

Tabel 5.2 berikut menjelaskan beberapa sumber pendanaan yang dapat ditempuh untuk membiayai implementasi inovasi-inovasi Jogja *Smart Province*.

Tabel 5.2 Beberapa sumber pendanaan untuk Jogja *Smart Province*

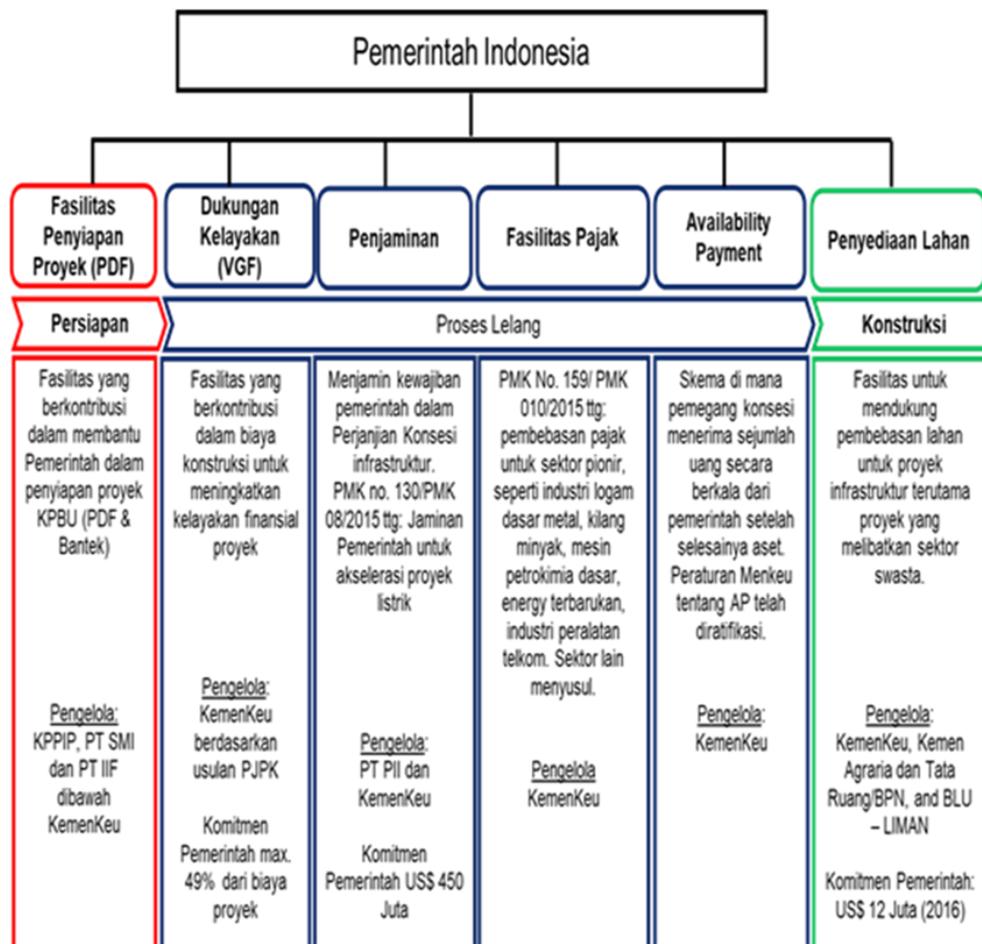
No	Skema	Pihak yang terlibat	Mekanisme	Risiko
1	APBD	Pemda DIY	Anggaran yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya. Pemerintah DIY mengendalikan sepenuhnya.	Ketergantungan pada pendapatan asli daerah, potensi defisit anggaran, serta prioritas anggaran lain yang mungkin lebih mendesak. Sangat terbatas jumlah dan jangka waktu (multi-years)
2	Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau <i>Public-Private Partnership</i> (PPP)	Pemda DIY dan swasta (perusahaan teknologi, investor, dll).	Pemerintah menyediakan fasilitas atau regulasi, sementara swasta memberikan dana dan teknologi.	Perbedaan visi antara pemerintah dan swasta, risiko gagal bayar oleh salah satu pihak, serta potensi konflik kepentingan. Peraturan yang ada terbatas.

No	Skema	Pihak yang terlibat	Mekanisme	Risiko
3	Obligasi daerah	Pemda DIY dan investor.	Pemda DIY menerbitkan obligasi yang dibeli oleh investor dengan janji pengembalian dana ditambah bunga di masa depan.	Fluktuasi suku bunga, potensi gagal bayar, dan tekanan terhadap kondisi keuangan daerah di masa depan. Mekanisme belum tersedia dan kurang dimanfaatkan.
4	Hibah dan/atau pinjaman dari Pemerintah Pusat	Pemda DIY dan pemerintah pusat.	Pemerintah pusat memberikan hibah atau pinjaman dengan syarat-syarat tertentu untuk proyek <i>Smart Province</i> di DIY.	Ketergantungan pada pemerintah pusat, potensi perubahan regulasi, serta kewajiban pengembalian dana jika berupa pinjaman.
5	CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	Pemda DIY dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi atau memiliki kepentingan di DIY.	Perusahaan menyediakan dana atau fasilitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.	Tidak konsisten, bergantung pada kebijakan perusahaan, serta potensi perbedaan visi dan kepentingan.
6	Pendanaan melalui Lembaga Keuangan Daerah (LKD)	Pemerintah daerah dan LKD (seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.	LKD menyediakan pinjaman atau fasilitas kredit untuk mendanai proyek <i>Jogja Smart Province</i> .	Ketergantungan pada kestabilan LKD, fluktuasi suku bunga, dan potensi gagal bayar.
7	<i>Crowdfunding</i> dan pendanaan filantropis	Pemda DIY dan elemen-elemen masyarakat	Pemda DIY menyusun skema pendanaan proyek yang memungkinkan elemen-elemen masyarakat untuk berkontribusi.	Tidak konsisten, dana yang diperoleh tidak mencukupi.

Sumber: Hasil analisis, 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan *smart province* dan meningkatnya kebutuhan akan investasi dalam rangka keluar dari *middle income trap*, APBN saja tidak cukup untuk membangun *smart city*. Sehingga diperlukan alternatif pembiayaan, salah satu yang dapat diakses oleh pemerintah daerah saat ini

adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (yang selanjutnya disingkat KPBU) yang diatur dalam Peraturan presiden Nomor 38 Tahun 2015. Dan terkait dengan penyediaan skema pembiayaan untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur, dapat dilaksanakan melalui: (a) *Availability Payment*; (b) Bantuan Penyiapan Proyek (PDF); (c) *Viability Gap Fund (VGF)*; dan Bank infrastruktur. Reformasi ini merupakan siklus hidup proyek yang inovatif dan memiliki tujuan untuk mendorong dan mempercepat pembangunan proyek infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU.



Sumber: World Economic Forum, *Moving from Policy to Implementation: A Breakthrough in Infrastructure Development*, Indonesia Business Working Group, 26 November 2016

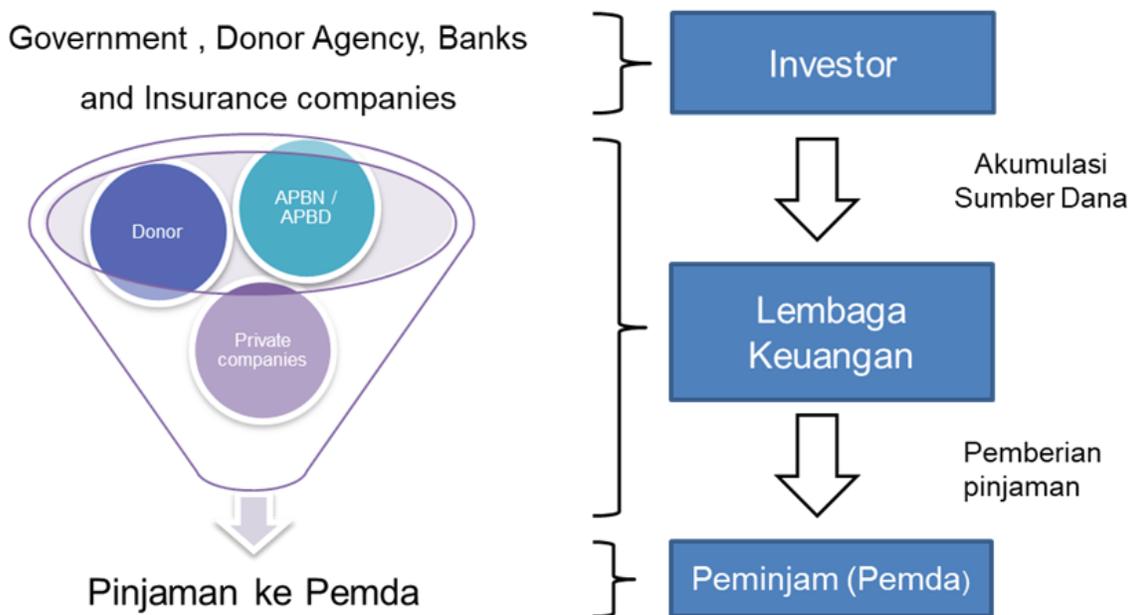
Gambar 5.2 Skema Alternatif Pendanaan Untuk Smart Province.

Dalam KPBU terdapat beberapa sektor yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. **Project Development Facilities (PDF):** PDF akan diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun dokumen persiapan proyek, dan membantu membantu pemerintah daerah dalam transaksi proyek PPP sampai proyek tersebut mencapai pembiayaan (*financial close*) serta feasible

untuk *project non-revenue generate*. PDF ini juga akan menjadi feeder system untuk Municipal Development Fund - RIDF dan VGF.

2. **Municipal Development Fund (MDF):** merupakan kumpulan uang yang dikelola di tingkat pemerintah daerah untuk tujuan investasi. Tujuan utama dari kumpulan uang itu adalah mengerahkan sumber-sumber dana dari peminjam, pemerintah pusat, dan lembaga donor untuk investasi infrastruktur kota.



Gambar 5.3 Mekanisme Pendanaan Alternatif Untuk Smart Province

3. **Availability Payment (AP):** adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
4. **Viability Gap Fund (VGF):** merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.

Pemerintah tengah mendorong pelaku usaha terutama pihak yang mengelola dana jangka panjang untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur. Melalui program Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) diharapkan gap pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat ditutup oleh Badan Usaha. Pihak pemerintah wajib melakukan studi

pendahuluan untuk menentukan konsep KPS, skema pembayaran dan sumber dana, serta metode untuk menawarkan proyek (jadwal, proses, dan penilaian). Apabila badan usaha yang menginisiasi proyek KPS, Badan Usaha harus memenuhi kriteria antara lain terintegrasi secara teknis dengan rencana induk terkait, layak secara ekonomi, dan Badan Usaha memiliki kemampuan untuk membiayai proyek KPS.

Untuk inovasi-inovasi yang melibatkan kolaborasi antar daerah kabupaten/kota, pemenuhan pendanaan dapat dibagi (*shared*) antara pihak-pihak yang terlibat, namun tetap memperhatikan otonomi keuangan masing-masing daerah. Pembagian kewajiban pendanaan ditentukan oleh proyek yang dijalankan oleh masing-masing daerah, dan perlu dikonsolidasikan bersamaan dengan proses perencanaan implementasi kolaborasi inovasi antar daerah. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan skema-skema pendanaan seperti tercantum dalam Tabel 5.2 Dalam memilih skema pendanaan yang paling sesuai, Pemda DIY perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kapasitas keuangan pemerintah;
2. Skala prioritas dan kompleksitas proyek *Smart Province*; dan
3. Potensi manfaat dan risiko dari setiap skema pendanaan.

BAB VI PENUTUP

Rencana Induk Jogja *Smart Province* disusun sebagai pedoman, panduan, maupun alat bantu bagi pemerintah dan *stakeholder* dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi implementasi Program Kerja *Smart Province* di DIY. Dokumen ini terdiri dari pendahuluan, arah pembangunan *Smart Province*, strategi pembangunan *Smart Province*, rencana aksi *Smart Province* untuk masing-masing dimensi, peta jalan pembangunan *Smart Province*, dan program kerjasama lintas daerah (*joint program*).

Rencana Induk *Smart Province* mengacu pada Analisis Strategis Rencana Induk Jogja *Smart Province*, dokumen pembangunan daerah serta berbagai dokumen terkait yang kemudian diselaraskan dengan SNI Kota Cerdas ISO 37122:2019. Keberhasilan implementasi Jogja *Smart Province* membutuhkan partisipasi dan kerjasama seluruh aktor pembangunan (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan lain sebagainya). Implementasi Jogja *Smart Province* khususnya dalam rencana aksi dan peta jalan pembangunan *Smart Province* disusun berdasarkan kondisi dan rencana yang akan diimplementasikan pada tahun berjalan. Namun demikian, pelaksanaan program kegiatan sangat dimungkinkan untuk terjadi perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sinergitas dalam melaksanakan dan mengawal program kerja menjadi salah satu upaya dalam mencapai visi dan misi Jogja *Smart Province*.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X